Laporan
Workshop
DPRD Kota Tegal

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun Anggaran 2027

Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

Kerja Sama Sekretariat DPRD Kota Tegal dan LPPM Universitas AKI Semarang

LAPORAN PELAKSANAAN

Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027

Mengawal Konsistensi Prioritas, Kapasitas Fiskal, dan Kinerja Anggaran untuk Memperkuat Kualitas Keputusan DPRD

PENYELENGGARA	LPPM Universitas AKI Semarang
MITRA	DPRD Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
LOKASI	Howard Johnson by Wyndham Pekalongan
WAKTU	16–18 Oktober 2026

LPPM Universitas AKI Semarang
Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan ***Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026** dengan tema "KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027" ini disusun oleh LPPM Universitas AKI Semarang sebagai pertanggungjawaban akademik dan administratif atas pelaksanaan kegiatan pada 16–18 Oktober 2026 di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan.

Kegiatan	*Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026
Tema	KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027
Penyelenggara	LPPM Universitas AKI Semarang
Mitra	DPRD Kota Tegal
Waktu dan tempat	16–18 Oktober 2026, Howard Johnson by Wyndham Pekalongan
Peserta	29 pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal

Semarang, 20 Oktober 2026

Mengetahui,
Rektor Univer sitas AKI Semarang

Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas AKI Semarang

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya ***Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026** dengan tema "Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027" pada 16–18 Oktober 2026 di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan.

KUA-PPAS merupakan titik strategis yang menentukan bagaimana arah pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan fiskal dan prioritas belanja. Kegiatan ini dirancang agar pimpinan dan anggota DPRD tidak berhenti pada pembacaan angka, tetapi mampu menguji konsistensi, prioritas, kapasitas fiskal, kinerja, dan dampak melalui kerangka Kerangka Telaah Strategis KUA-PPAS (SKPRF), hingga merumuskan posisi strategis dalam pembahasan bersama TAPD.

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan, ringkasan substansi setiap sesi, empat hasil kegiatan, dinamika diskusi dan kendala, serta hasil evaluasi dan capaian kegiatan. Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan sekaligus bahan rujukan bagi DPRD Kota Tegal dalam pembahasan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Ketua DPRD Kota Tegal, kusnendro, S.T., beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal yang telah mengikuti kegiatan secara penuh dan aktif;
- Rektor Universitas AKI, Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M., atas arahan, pembukaan, dan paparan pada Sesi Strategis;
- Narasumber Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si., serta fasilitator Teguh Rahmat P., atas kontribusi substansi dan fasilitasi proses;
- Seluruh panitia dan pihak Howard Johnson by Wyndham Pekalongan yang mendukung kelancaran kegiatan.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kegiatan di masa mendatang.

Semarang, Oktober 2026

Ketua LPPM Universitas AKI Semarang

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026 dengan tema KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diselenggarakan oleh LPPM Universitas AKI Semarang pada 16–18 Oktober 2026 di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan. Kegiatan berlangsung tiga hari dengan beban belajar 14,08 JP melalui tiga fase: Pemetaan (Hari I), Pengujian (Hari II), dan Sintesis (Hari III), menggunakan kerangka Kerangka Telaah Strategis KUA-PPAS (SKPRF) dengan enam lensa: Konsistensi, Prioritas, Ruang Fiskal, Kinerja, Dampak, dan Posisi.

29	100%	14,08	4	4,57
peserta DPRD hadir	kehadiran semua sesi	jam pelajaran	hasil kegiatan	skor evaluasi (1–5)

Capaian utama:

- **Pelaksanaan.** Seluruh sesi berjalan sesuai rencana dengan pergeseran waktu mulai sesi paling lama 15 menit. Pembukaan dipandu pembawa acara, diawali lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Rektor Universitas AKI dan Ketua DPRD Kota Tegal, serta penyerahan cindramata.
- **Hasil.** Empat hasil kegiatan tersusun: Peta Pertanyaan Strategis (18 pertanyaan), Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal (enam lensa), Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis (enam isu strategis dan lima rekomendasi), serta Ringkasan Evaluasi dan Komitmen (delapan komitmen tindak lanjut).
- **Evaluasi.** Skor rata-rata tujuh dimensi 4,57 (Sangat Baik). Refleksi pra–pasca menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dari 2,63 (Cukup) menjadi 4,13 (Baik).
- **Catatan.** Kendala yang dijumpai bersifat minor (waktu registrasi, kelengkapan dokumen, dan jaringan) dan dapat diatasi saat pelaksanaan. Saran perbaikan utama adalah penyediaan dokumen kerja lebih awal serta pendampingan lanjutan pada pembahasan KUA-PPAS.

Nilai strategis kegiatan adalah mendorong pembahasan KUA-PPAS dari sekadar membaca angka menuju menguji kualitas pilihan kebijakan dan anggaran.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum dan Rujukan 2
C. Maksud dan Tujuan 2
D. Hasil dan Capaian yang Diharapkan 3
E. Kerangka Analisis SKPRF 4
Pelaksanaan Kegiatan 5
A. Waktu dan Tempat 5
B. Peserta 5
C. Narasumber, Fasilitator, dan Panitia 6
D. Metodologi dan Alur Pembelajaran 6
E. Jadwal Realisasi Kegiatan 7
Uraian dan Hasil Pelaksanaan 9
A. Hari I (16 Oktober 2026) — Pemetaan 9
B. Hari II (17 Oktober 2026) — Pengujian 12
C. Hari III (18 Oktober 2026) — Sintesis 13
Hasil Kegiatan 15
A. Hasil 1 — Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS 15
B. Hasil 2 — Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS 16
C. Hasil 3 — Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis 17
D. Hasil 4 — Ringkasan Evaluasi dan Komitmen 19
E. Dokumentasi dan Perekaman Pengetahuan 20
Dinamika Diskusi, Kendala, dan Saran 21
A. Dinamika Diskusi 21
B. Kendala Teknis dan Non-Teknis 22
C. Saran Perbaikan 22
Evaluasi dan Capaian Kegiatan 23
A. Pendekatan Evaluasi 23
B. Hasil Penilaian Tujuh Dimensi 23
C. Hasil Refleksi Pra dan Pasca Kegiatan 24
D. Umpan Balik Kualitatif 25
E. Capaian terhadap Kerangka Hasil dan Tujuan Khusus 26
F. Pengelolaan Risiko 27
Penutup 28
A. Kesimpulan 28
B. Rekomendasi 28
C. Penutup 28
Lampiran A — Daftar Hadir Peserta 30
Lampiran B — Materi Narasumber 31
Lampiran C — Dokumentasi Kegiatan 32
Lampiran D — Instrumen Evaluasi 34
Lampiran E — Rekapitulasi Hasil Evaluasi 37
Lampiran F — Berita Acara dan Notulensi per Sesi 40

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1. Dasar hukum dan dokumen rujukan kegiatan 2
Tabel 2. Hasil dan capaian kegiatan 3
Tabel 3. Enam lensa Kerangka Telaah Strategis KUA-PPAS (SKPRF) 4
Tabel 4. Identitas pelaksanaan kegiatan 5
Tabel 5. Rekapitulasi kehadiran peserta 5
Tabel 6. Narasumber, fasilitator, dan pembagian sesi 6
Tabel 7. Jadwal realisasi Hari I (16 Oktober 2026) — Pemetaan 7
Tabel 8. Jadwal realisasi Hari II (17 Oktober 2026) — Pengujian 8
Tabel 9. Jadwal realisasi Hari III (18 Oktober 2026) — Sintesis 8
Tabel 10. Rekapitulasi harapan peserta pada sesi komitmen belajar (n = 29) 10
Tabel 11. Rekapitulasi kekhawatiran peserta pada sesi komitmen belajar (n = 29) 10
Tabel 12. Norma kelas dan komitmen belajar hasil sesi komitmen belajar 11
Tabel 13. Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS 15
Tabel 14. Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS 16
Tabel 15. Isu strategis, posisi DPRD, dan rekomendasi 17
Tabel 16. Pengelompokan prioritas pembahasan 18
Tabel 17. Komitmen tindak lanjut peserta 19
Tabel 18. Komponen dokumen pengetahuan dan lokasinya dalam laporan 20
Tabel 19. Isu utama yang mengemuka dalam diskusi dan tanggapan 21
Tabel 20. Kendala pelaksanaan dan penanganannya 22
Tabel 21. Kategori skor rata-rata 23
Tabel 22. Hasil penilaian tujuh dimensi evaluasi (n = 29; skala 1–5) 23
Tabel 23. Hasil refleksi pra dan pasca kegiatan (n = 29; skala 1–5) 24
Tabel 24. Rekapitulasi umpan balik terbuka peserta (n = 29) 25
Tabel 25. Capaian indikator pada kerangka hasil kegiatan 26
Tabel 26. Pemenuhan tujuan khusus kegiatan 26
Tabel 27. Realisasi mitigasi risiko 27
Tabel 28. Rekapitulasi daftar hadir per hari 30
Tabel 29. Daftar materi narasumber 31
Tabel 30. Definisi skala penilaian 34
Tabel 31. Butir penilaian tujuh dimensi evaluasi 34
Tabel 32. Butir refleksi pra dan pasca kegiatan 35
Tabel 33. Pertanyaan terbuka 35
Tabel 34. Rekapitulasi penilaian tujuh dimensi evaluasi per responden 37
Tabel 35. Rekapitulasi refleksi pra dan pasca kegiatan per responden 38
Tabel 36. Contoh umpan balik terbuka peserta (parafrase) 38

Daftar Gambar

Gambar 1. Skor rata-rata tujuh dimensi evaluasi (skala 1–5) 24
Gambar 2. Perbandingan skor refleksi pra dan pasca kegiatan 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis yang menentukan bagaimana arah pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan fiskal dan prioritas belanja. KUA tidak sekadar memuat angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi menggambarkan arah kebijakan fiskal daerah beserta asumsi yang mendasarinya. PPAS kemudian menerjemahkan arah tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan, prioritas program, capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara.

Untuk Tahun Anggaran 2027, penyusunan APBD harus ditempatkan dalam hubungan yang konsisten antara RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan APBD. Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 memperkuat keterhubungan tersebut dengan menekankan konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Di tingkat nasional, arah kebijakan fiskal 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, yang membawa konsekuensi bagi daerah untuk memastikan prioritas anggarannya mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, hasiltivitas, dan pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, DPRD dituntut tidak hanya bertanya “berapa besar plafonnya?”, tetapi juga “mengapa menjadi prioritas?”, “apa dasar kebijakannya?”, “apa target kinerjanya?”, “apakah fiskal daerah mampu menopangnya?”, “apa konsekuensinya terhadap prioritas lain?”, dan “apa manfaat yang akan diterima masyarakat?”. Kemampuan inilah yang disebut sebagai kemampuan menelaah anggaran secara strategis (*strategic budget scrutiny*).

Pembahasan KUA-PPAS masih berpotensi terjebak pada pendekatan sektoral dan administratif, misalnya membandingkan pagu dengan tahun sebelumnya tanpa menguji perubahan kebutuhan, memperlakukan alokasi sebagai “jatah” perangkat daerah, atau membahas anggaran tanpa melihat dampak dan manfaat publik. Kesenjangan tersebut dapat dirumuskan dalam tiga kalimat kunci:

- Ada anggaran, tetapi belum tentu ada prioritas.
- Ada prioritas, tetapi belum tentu ada kinerja.
- Ada kinerja, tetapi belum tentu ada dampak.

Atas dasar itu, LPPM Universitas AKI Semarang menyelenggarakan *Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026 dengan tema KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Pendekatan yang digunakan tidak dimaksudkan menggantikan kewenangan TAPD, Bappeda, perangkat daerah, APIP, maupun lembaga pemeriksa, melainkan memperkuat kapasitas DPRD menjalankan fungsi anggaran melalui pertanyaan yang lebih

tajam, analisis berbasis dokumen, dan posisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

B. Dasar Hukum dan Rujukan

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dokumen rujukan yang dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 1. Dasar hukum dan dokumen rujukan kegiatan

Kelompok	Rujukan
Undang-Undang	• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (landasan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan DPRD) • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah	• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri	• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri No. 86 Tahun 2017 (sepanjang masih relevan) • Permendagri No. 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 • Permendagri No. 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 • Permendagri No. 6 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota • Kepmendagri terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur beserta pemutakhirannya
Dokumen perencanaan dan fiskal	• KEM-PPKF Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027 • RPJMD Kota Tegal Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2027 • Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah • Ketentuan teknis lain yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan umum. Memperkuat kapasitas kolektif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menguji kualitas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berdasarkan konsistensi perencanaan, prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, target kinerja, dampak, dan kepentingan publik.

Tujuan khusus kegiatan adalah agar peserta mampu:

1. memahami kedudukan KUA-PPAS dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah;
2. menguji konsistensi RPJMD–RKPD–KUA-PPAS;
3. menilai keselarasan kebijakan daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional;
4. mengidentifikasi prioritas yang memiliki urgensi dan relevansi strategis;
5. menganalisis kapasitas dan ruang fiskal daerah;
6. menguji hubungan antara plafon anggaran dan target kinerja;
7. menilai kualitas indikator, sasaran, keluaran, dan capaian program;
8. mengidentifikasi risiko fiskal dan implementasi;
9. membaca penandaan tematik sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan;
10. menilai manfaat dan dampak prioritas anggaran;
11. merumuskan isu strategis pembahasan KUA-PPAS; dan
12. membangun posisi dan rekomendasi DPRD secara terstruktur.

D. Hasil dan Capaian yang Diharapkan

Tabel 2. Hasil dan capaian kegiatan

Jenis	Uraian
Hasil 1	Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS (*KUA-PPAS Strategic Question Map*)
Hasil 2	Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS (*KUA-PPAS Consistency & Fiscal Review Matrix*)
Hasil 3	Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis (*Strategic Budget Position & Recommendation*)
Hasil 4	Ringkasan Evaluasi dan Komitmen (*Evaluation & Commitment Summary*)
Capaian	Meningkatnya kualitas penelaahan anggaran secara strategis oleh DPRD: peserta mampu membaca KUA-PPAS secara lintas dokumen; menguji hubungan prioritas dengan anggaran dan anggaran dengan kinerja; mengidentifikasi pertukaran pilihan fiskal; membedakan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral; serta membangun argumentasi dan rekomendasi berbasis dokumen.

E. Kerangka Analisis SKPRF

Kerangka analisis utama kegiatan adalah Kerangka Telaah Strategis KUA-PPAS (*Strategic KUA-PPAS Review Framework*, SKPRF) yang terdiri atas enam lensa berjenjang, dimulai dari

konsistensi perencanaan hingga posisi strategis DPRD. Seluruh hasil analisis disintesiskan untuk membantu DPRD membangun posisi dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027.

KONSISTENSI 01	PRIORITAS 02	RUANG FISKAL 03	KINERJA 04	DAMPAK 05	POSISI 06

Tabel 3. Enam lensa Kerangka Telaah Strategis KUA-PPAS (SKPRF)

No.	Dimensi	Pertanyaan kunci	Fokus pengujian
01	KONSISTENSI	Apakah arah KUA-PPAS konsisten dengan rencana pembangunan?	RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → RKA-SKPD; konsistensi program, sasaran, indikator, target, kerangka pendanaan, serta perubahan pagu.
02	PRIORITAS	Apa yang benar-benar harus diprioritaskan?	Urgensi, kebutuhan masyarakat, isu strategis daerah, sinkronisasi nasional–daerah, kontribusi terhadap target pembangunan.
03	RUANG FISKAL	Apakah prioritas tersebut mampu dibiayai?	Kapasitas pendapatan, PAD, transfer, ruang fiskal, struktur belanja, belanja wajib (*mandatory spending*), pembiayaan, konsekuensi jangka menengah.
04	KINERJA	Apa yang dibeli oleh setiap rupiah anggaran?	Target, indikator, keluaran, capaian, hubungan pagu dengan target kinerja, kapasitas pelaksanaan, kinerja historis.
05	DAMPAK	Apa perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat?	Manfaat publik, cakupan, efektivitas, pemerataan, kontribusi terhadap sasaran makro, dampak sosial dan ekonomi.
06	POSISI	Apa posisi strategis DPRD?	Sintesis menjadi isu kunci, pertanyaan pembahasan, prioritas yang diperkuat atau dikaji kembali, risiko yang dikendalikan, dan rekomendasi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Tabel 4. Identitas pelaksanaan kegiatan

Nama kegiatan	*Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026
Tema	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Penyelenggara	LPPM Universitas AKI Semarang
Mitra / pengguna	DPRD Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Waktu	16–18 Oktober 2026 (tiga hari)
Tempat	Howard Johnson by Wyndham Pekalongan
Format	Tatap muka, dengan tata ruang yang mendukung diskusi pleno dan dialog terfasilitasi
Beban belajar	14,08 JP (setara dengan 14 JP yang direncanakan), 1 JP = 60 menit

B. Peserta

Peserta kegiatan adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal. Dari 30 peserta yang dialokasikan, 29 peserta dapat mengikuti kegiatan, seluruhnya berasal dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal. Seluruh peserta hadir dan mengikuti semua sesi dari hari pertama hingga hari ketiga, sehingga tingkat kehadiran mencapai 100% pada setiap hari pelaksanaan. Satu peserta lainnya berhalangan hadir; hal ini tidak mengurangi kualitas proses karena kegiatan dirancang untuk kerja kelompok yang tetap berjalan pada jumlah peserta tersebut. Daftar hadir lengkap terlampir pada *Lampiran A.*

Tabel 5. Rekapitulasi kehadiran peserta

Keterangan	Jumlah	Persentase
Peserta yang direncanakan	30 orang	100,0%
Peserta yang mengikuti kegiatan (pimpinan dan anggota DPRD)	29 orang	96,7% dari alokasi
Kehadiran Hari I (16 Oktober 2026)	29 orang	100,0% dari peserta
Kehadiran Hari II (17 Oktober 2026)	29 orang	100,0% dari peserta
Kehadiran Hari III (18 Oktober 2026)	29 orang	100,0% dari peserta
Kehadiran pada seluruh sesi	29 orang	100,0% dari peserta

C. Narasumber, Fasilitator, dan Panitia

Dalam rancangan kegiatan ini, narasumber berperan sebagai pemimpin substansi, fasilitator sebagai pemimpin proses dan sintesis, dan peserta sebagai penelaah kelembagaan. Susunan pelaksana kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Narasumber, fasilitator, dan pembagian sesi

Peran	Nama	Sesi yang dibawakan
Narasumber (Sesi Strategis)	Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M. Rektor Universitas AKI	Hari I: Sesi Strategis "Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah"
Narasumber	Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si. Akademisi, pegiat, dan Tenaga Ahli FITRA	Hari II: Sesi I (Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal) dan Sesi II (Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik)
Fasilitator	Teguh Rahmat P. Praktisi	Pembangunan Komitmen Belajar (§komitmen belajar§), Tinjauan Pertanyaan Kritis, Refleksi Strategis, Sesi Sintesis, Sesi Perumusan Rekomendasi, serta Refleksi, Evaluasi, dan Komitmen
Pembawa acara	Dhea Awinna	Memandu acara pembukaan, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga rangkaian sambutan dan penyerahan cindramata
Panitia penyelenggara	LPPM Universitas AKI Semarang	Registrasi, dukungan teknis dan administrasi, akomodasi, dokumentasi, serta penutupan kegiatan

D. Metodologi dan Alur Pembelajaran

Kegiatan menggunakan pendekatan penelusuran strategis terfasilitasi (*facilitated strategic inquiry*) yang menempatkan analisis, pengujian kritis, dan sintesis sebagai inti proses. Peserta tidak hanya menerima paparan, tetapi membaca dokumen, mengidentifikasi persoalan, menguji asumsi dan pilihan kebijakan, serta merumuskan implikasi strategis terhadap pembahasan KUA-PPAS 2027. Metode pembelajaran memadukan wawasan ahli, pembacaan dokumen, pertanyaan kritis, analisis terstruktur, analisis pertukaran pilihan fiskal, diskusi terfasilitasi, sintesis kolaboratif, dan penyusunan rekomendasi strategis.

Setiap sesi mengikuti alur dokumen → pertanyaan → analisis → penilaian → posisi → rekomendasi, dan seluruh kegiatan disusun dalam tiga fase: pemetaan (*frame*), pengujian (*review*), dan sintesis (*synthesize*).

HARI I — PEMETAAN	HARI II — PENGUJIAN	HARI III — SINTESIS
Memetakan kebijakan, dokumen, dan isu strategis	Menguji konsistensi, fiskal, kinerja, dan risiko	Menyusun posisi, rekomendasi, dan tindak lanjut

Peserta dibagi ke dalam lima kelompok kerja (empat kelompok beranggotakan 6 orang dan satu kelompok 5 orang) yang masing-masing memegang satu lensa utama pada Hari II: Konsistensi, Prioritas, Ruang Fiskal, Kinerja, dan Dampak. Dokumen kerja yang dipersiapkan meliputi RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, Rancangan KUA 2027, Rancangan PPAS 2027, KEM-PPKF 2027, data realisasi APBD tahun sebelumnya, APBD berjalan, data kapasitas fiskal, data target kinerja makro, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

E. Jadwal Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Terdapat sedikit pergeseran waktu mulai sesi, paling lama 15 menit, akibat proses registrasi dan transisi antarsesi. Pergeseran tersebut masih dalam batas toleransi, tidak mengubah durasi efektif setiap sesi, dan tidak memengaruhi pemenuhan beban belajar (3,50 + 6,75 + 3,83 = 14,08 JP). Sesi pada Hari II diberi nomor Sesi I dan Sesi II.

Tabel 7. Jadwal realisasi Hari I (16 Oktober 2026) — Pemetaan

Waktu	Agenda	Durasi	Pelaksana
14.00–15.10	Kedatangan, registrasi, dan penempatan kamar peserta	—	Panitia
15.10–15.45	Pembukaan: menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, dan penyerahan cindramata	—	Pembawa acara (Dhea Awinna), Rektor Universitas AKI, dan Ketua DPRD Kota Tegal
15.45–17.15	Pembangunan Komitmen Belajar	90’ (1,50 JP)	Fasilitator
17.15–18.15	Istirahat	—	—
18.15–19.35	Makan malam	—	—
19.35–21.35	Sesi Strategis: Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah	120’ (2,00 JP)	Narasumber (Rektor Universitas AKI) dan Fasilitator
Jumlah beban belajar Hari I		**3,50 JP**	

Tabel 8. Jadwal realisasi Hari II (17 Oktober 2026) — Pengujian

Waktu	Agenda	Durasi	Pelaksana
08.35–08.50	Tinjauan Pertanyaan Kritis	15′	Fasilitator
08.50–12.05	Sesi I — Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal	195′ (3,25 JP)	Narasumber dan Fasilitator
12.05–13.35	Ishoma	—	—
13.35–15.05	Sesi II — Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik	90′ (1,50 JP)	Narasumber dan Fasilitator
15.05–15.20	Rehat kopi	—	—
15.20–17.05	Lanjutan Sesi II (hasil: Matriks Telaah KUA-PPAS)	105′ (1,75 JP)	Narasumber dan Fasilitator
Jumlah beban belajar Hari II (termasuk Tinjauan Pertanyaan Kritis 0,25 JP)		**6,75 JP**	

Tabel 9. Jadwal realisasi Hari III (18 Oktober 2026) — Sintesis

Waktu	Agenda	Durasi	Pelaksana
08.35–08.50	Refleksi Strategis	15′	Fasilitator
08.50–09.50	Sesi Sintesis: Menentukan Isu Strategis Pembahasan KUA-PPAS	60′ (1,00 JP)	Fasilitator
09.50–10.05	Rehat kopi	—	—
10.05–10.40	Sesi Perumusan Rekomendasi: Merumuskan Posisi Anggaran Strategis	35′ (0,58 JP)	Fasilitator
10.40–12.40	Refleksi, Evaluasi, dan Komitmen	120′ (2,00 JP)	Fasilitator
12.40–13.05	Penutupan	25′	LPPM Universitas AKI
Jumlah beban belajar Hari III (termasuk Refleksi Strategis 0,25 JP)		**3,83 JP**	

BAB III

URAIAN DAN HASIL PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan jalannya kegiatan per hari beserta ringkasan substansi setiap sesi sebagaimana tercantum dalam jadwal acara. Materi presentasi narasumber terlampir pada *Lampiran B,* sedangkan dokumentasi foto terlampir pada *Lampiran C*, serta berita acara dan notulensi per sesi pada *Lampiran F.*

A. Hari I (16 Oktober 2026) — Pemetaan

Hari pertama bertujuan membangun perspektif bersama mengenai KUA-PPAS 2027, hubungan perencanaan dan penganggaran, serta mengenalkan enam lensa SKPRF sebagai kerangka analisis. Keluaran Hari I adalah Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS.

1. Registrasi dan Penempatan Kamar Peserta

Peserta mulai berdatangan pada pukul 14.00 dan melakukan registrasi serta menempati kamar di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan. Panitia membagikan perlengkapan kegiatan. Seluruh 29 peserta telah terdaftar hadir pada pukul 15.10, sehingga acara pembukaan dapat dimulai.

2. Pembukaan

Acara pembukaan dipandu oleh pembawa acara, Dhea Awinna. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta dan hadirin, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian sambutan.

Sambutan pertama disampaikan oleh Rektor Universitas AKI, Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M., yang menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk mendampingi DPRD melalui pendekatan akademik yang berbasis dokumen dan data, serta menekankan bahwa workshop ini dirancang sebagai ruang menguji, bukan sekadar menerima materi. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, S.T., yang menyampaikan pentingnya kualitas pembahasan KUA-PPAS 2027 sebagai penentu arah penggunaan sumber daya publik daerah dan mengajak seluruh anggota mengikuti rangkaian sesi secara aktif.

Pada rangkaian pembukaan dilakukan penyerahan cindramata oleh Rektor Universitas AKI kepada Ketua DPRD Kota Tegal sebagai simbol apresiasi dan penguatan kerja sama kelembagaan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

3. Pembangunan Komitmen Belajar

Sesi komitmen belajar dipandu fasilitator, Teguh Rahmat P., selama 90 menit. Sesi bertujuan menyamakan harapan, mengenali kekhawatiran, serta menyepakati norma belajar dan komitmen peserta sebelum masuk ke substansi. Prosesnya terdiri atas perkenalan singkat, penulisan harapan dan kekhawatiran pada kartu ide, pengelompokan tema secara plenari, penyepakatan norma kelas, dan perumusan komitmen belajar.

Harapan peserta didominasi oleh kebutuhan untuk menguji, bukan sekadar memahami, isi KUA-PPAS. Tabel berikut merangkum tema harapan yang dikemukakan peserta (satu peserta dapat menyampaikan lebih dari satu harapan).

Tabel 10. Rekapitulasi harapan peserta pada sesi komitmen belajar (n = 29)

No.	Tema harapan	Peserta (orang)	%
1	Mampu membaca dan menguji KUA-PPAS lintas dokumen, tidak berhenti pada angka	24	82,8
2	Memahami keterkaitan RPJMD–RKPD–KUA-PPAS–RKA-SKPD	21	72,4
3	Memiliki cara menguji alasan prioritas dan pagu perangkat daerah	19	65,5
4	Memahami ruang fiskal dan konsekuensi pertukaran pilihan antarprioritas	17	58,6
5	Mampu menyusun posisi dan rekomendasi yang berbasis dokumen untuk pembahasan bersama TAPD	15	51,7
6	Memahami penandaan tematik dan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional	11	37,9

Kekhawatiran yang mengemuka berkaitan dengan keterbatasan waktu, bahasa teknis, ketersediaan data, dan keberlanjutan hasil kegiatan. Kekhawatiran ini kemudian dijadikan bahan penyesuaian proses fasilitasi, misalnya dengan menyederhanakan istilah teknis dan menyiapkan lembar kerja terstruktur.

Tabel 11. Rekapitulasi kekhawatiran peserta pada sesi komitmen belajar (n = 29)

No.	Tema kekhawatiran	Peserta (orang)	%
1	Waktu terbatas dibandingkan kompleksitas dokumen KUA-PPAS	18	62,1
2	Istilah teknis dan indikator kinerja sulit dipahami	15	51,7
3	Data pendukung (realisasi dan kapasitas fiskal) tidak tersedia lengkap	13	44,8
4	Hasil workshop tidak ditindaklanjuti dalam pembahasan sesungguhnya	12	41,4
5	Diskusi didominasi sebagian peserta atau terbawa kepentingan politik	9	31,0

Peserta menyepakati norma kelas dan komitmen belajar sebagai berikut.

Tabel 12. Norma kelas dan komitmen belajar hasil sesi komitmen belajar

Kategori	Kesepakatan
Norma kelas	• Hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh sesi • Gawai dalam mode senyap pada saat sesi berlangsung • Setiap anggota berkesempatan berbicara; saling menghargai perbedaan pandangan • Berfokus pada substansi dan dokumen, bukan pada pribadi atau kepentingan politik • Setiap kesimpulan harus disertai dasar dokumen atau data
Komitmen individu	• Membaca dokumen kerja secara aktif dan mengajukan pertanyaan kritis • Mencatat temuan pada lembar kerja yang disediakan
Komitmen kolektif	• Menghasilkan empat hasil kegiatan secara tuntas dalam tiga hari • Membawa hasil workshop ke pembahasan KUA-PPAS di alat kelengkapan dewan masing-masing

Hasil sesi komitmen belajar menunjukkan bahwa peserta datang dengan kebutuhan yang selaras dengan desain kegiatan, yaitu beralih dari pembacaan anggaran menuju penelaahan anggaran. Kekhawatiran mengenai data dan tindak lanjut menjadi catatan penting yang dibahas kembali pada Hari III.

4. Sesi Strategis: Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah

Sesi dibawakan oleh Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M. (Rektor Universitas AKI) dengan fasilitasi Teguh Rahmat P. selama 120 menit pada malam hari. Ringkasan substansi yang disampaikan:

- KUA-PPAS sebagai dokumen kebijakan. KUA-PPAS ditempatkan sebagai dokumen kebijakan, bukan sekadar dokumen anggaran, sekaligus titik kendali strategis sebelum perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kualitas pembahasan pada tahap ini memengaruhi kualitas keputusan anggaran pada tahap berikutnya.
- Keterhubungan dokumen. Penyusunan APBD 2027 harus konsisten antara RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan APBD, dengan penekanan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 pada konsistensi program dan kerangka pendanaan.
- Konteks fiskal nasional. Tema kebijakan fiskal 2027 “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” menuntut prioritas daerah mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, hasiltivitas, dan pelayanan publik. Setiap penguatan satu prioritas membawa konsekuensi bagi ruang pembiayaan prioritas lain (pertukaran pilihan).
- Dari pembacaan anggaran ke penelaahan anggaran. DPRD didorong mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: mengapa menjadi prioritas, apa dasar kebijakannya, apa target kinerjanya, apakah fiskal mampu menopangnya, dan apa manfaat bagi masyarakat.

- Pengenalan SKPRF. Enam lensa (Konsistensi, Prioritas, Ruang Fiskal, Kinerja, Dampak, Posisi) diperkenalkan sebagai kerangka berjenjang, termasuk tiga kesenjangan kunci: ada anggaran belum tentu ada prioritas, ada prioritas belum tentu ada kinerja, dan ada kinerja belum tentu ada dampak.

Setelah paparan dan dialog, peserta bekerja dalam lima kelompok untuk merumuskan pertanyaan kritis pada setiap lensa, kemudian dipadukan secara plenari menjadi Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS (lihat Bab IV, bagian A).

B. Hari II (17 Oktober 2026) — Pengujian

Hari kedua difokuskan pada pengujian substantif KUA-PPAS melalui lima lensa utama dengan narasumber Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si. Keluaran Hari II adalah Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS.

1. Tinjauan Pertanyaan Kritis

Fasilitator membuka hari kedua dengan meninjau kembali pertanyaan kritis hasil Hari I, mengonfirmasi pembagian lima kelompok kerja beserta lensa yang dipegang masing-masing, dan menjelaskan lembar kerja matriks telaah yang akan diisi sepanjang hari.

2. Sesi I — Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal

Sesi berlangsung 195 menit dan memadukan paparan narasumber dengan latihan membaca dokumen. Ringkasan substansi:

- Uji konsistensi. Penelusuran keterhubungan vertikal RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → RKA-SKPD dan keterhubungan horizontal antara program, sasaran, indikator, target, kerangka pendanaan, serta perubahan pagu. Peserta dikenalkan teknik tabel penelusuran untuk mengecek satu program dari dokumen perencanaan hingga plafon.
- Uji ketepatan prioritas. Penilaian prioritas berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, isu strategis daerah, sinkronisasi nasional–daerah, dan kontribusi terhadap target pembangunan, serta pembedaan antara kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral.
- Uji kapasitas dan ruang fiskal. Pembacaan struktur pendapatan (PAD dan transfer), struktur belanja, belanja wajib (*mandatory spending*), pembiayaan, serta konsekuensi fiskal jangka menengah, termasuk logika pertukaran pilihan ketika satu prioritas diperkuat.

Setelah paparan, Kelompok 1 sampai 5 membaca Rancangan KUA-PPAS 2027 bersama RKPD dan data pendukung sesuai lensa masing-masing, lalu mencatat temuan awal pada lembar kerja. Narasumber berkeliling memberikan umpan balik dan menguji argumentasi kelompok.

3. Sesi II — Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik

Sesi berlangsung 195 menit (90 menit sebelum dan 105 menit sesudah rehat kopi). Ringkasan substansi:

- **Uji kinerja.** Penggunaan rantai kinerja Masukan → Keluaran → Capaian → Dampak untuk menguji hubungan pagu dengan target, kualitas indikator (jelas, terukur, relevan), kapasitas pelaksanaan, dan kinerja historis.
- **Uji dampak.** Penilaian manfaat publik, cakupan penerima manfaat, efektivitas, pemerataan, serta kontribusi program terhadap sasaran makro daerah.
- **Risiko dan keselarasan tematik.** Identifikasi risiko fiskal dan implementasi (asumsi pendapatan, belanja mengikat, kesiapan pelaksana, waktu pelaksanaan) serta pembacaan penandaan tematik sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan pusat–daerah.

Hasil kerja kelompok dipresentasikan secara bergilir dan ditanggapi narasumber serta kelompok lain. Seluruh temuan dihimpun ke dalam satu matriks bersama yang menjadi Matriks Telaah KUA-PPAS (lihat Bab IV, bagian B).

C. Hari III (18 Oktober 2026) — Sintesis

Hari ketiga mengolah hasil telaah menjadi isu strategis, posisi DPRD, rekomendasi, serta komitmen tindak lanjut. Seluruh sesi difasilitasi oleh Teguh Rahmat P.

1. Refleksi Strategis

Selama 15 menit peserta merefleksikan pembelajaran Hari II melalui tiga pertanyaan pemandu: apa yang berubah dalam cara membaca KUA-PPAS, temuan apa yang paling mengejutkan, dan pertanyaan apa yang belum terjawab. Refleksi ini menjadi jembatan menuju sintesis.

2. Sesi Sintesis: Menentukan Isu Strategis Pembahasan KUA-PPAS

Dalam 60 menit, kelompok mengelompokkan temuan matriks ke dalam tema-tema besar, kemudian menyaringnya dengan empat kriteria: materialitas (besar kecilnya pengaruh), urgensi untuk dibahas sebelum KUA-PPAS disepakati, kesesuaian dengan kewenangan DPRD, dan dampak bagi masyarakat. Proses ini menghasilkan enam isu strategis pembahasan (lihat Bab IV, bagian C).

3. Sesi Perumusan Rekomendasi: Merumuskan Posisi Anggaran Strategis

Dalam 35 menit, isu strategis diterjemahkan menjadi posisi dan rekomendasi dengan empat kategori: prioritas yang perlu diperkuat, prioritas yang perlu dikaji kembali, risiko yang perlu dikendalikan, dan rekomendasi strategis. Fasilitator memastikan setiap posisi merujuk pada dokumen dan temuan matriks sebagai dasar argumentasi.

4. Refleksi, Evaluasi, dan Komitmen

Sesi 120 menit ini mencakup refleksi pembelajaran, pengisian instrumen evaluasi (refleksi pra dan pasca kegiatan serta penilaian tujuh dimensi), diskusi plenari, dan perumusan komitmen tindak lanjut. Hasil evaluasi disajikan pada Bab VI, sedangkan komitmen tindak lanjut pada Bab IV bagian D.

5. Penutupan

Penutupan dilakukan oleh LPPM Universitas AKI Semarang. Pada penutupan disampaikan ringkasan capaian empat hasil kegiatan, apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal atas kehadiran dan partisipasi penuh selama tiga hari, serta harapan agar hasil workshop digunakan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

Bab ini menyajikan empat hasil kegiatan. Keempat hasil tersebut disusun dari hasil kerja kelompok dan diskusi plenari, kemudian dirapikan oleh fasilitator. Perlu dicatat bahwa temuan pada hasil ini bersifat indikatif, yaitu berdasarkan dokumen dan data yang tersedia selama workshop, dan perlu dikonfirmasi dengan TAPD dalam pembahasan resmi KUA-PPAS 2027.

A. Hasil 1 — Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS

Peta pertanyaan strategis disusun pada Hari I berdasarkan enam lensa SKPRF. Terkumpul 18 pertanyaan strategis, tiga pertanyaan untuk setiap lensa, beserta dokumen yang diperlukan untuk mengujinya.

Tabel 13. Peta Pertanyaan Strategis KUA-PPAS

Lensa	Pertanyaan strategis	Dokumen/data uji
KONSISTENSI	C1. Apakah program prioritas, sasaran, dan indikator dalam Rancangan KUA-PPAS 2027 dapat ditelusuri langsung ke RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2027?	RPJMD, RKPD, Rancangan KUA-PPAS
	C2. Apakah terdapat program atau kegiatan pada PPAS yang tidak tercantum dalam RKPD 2027, dan apa dasar penambahannya?	RKPD 2027 dan Rancangan PPAS
	C3. Apakah perubahan pagu antara RKPD dan PPAS disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan?	RKPD dan PPAS (perbandingan pagu)
PRIORITAS	P1. Atas dasar kriteria apa suatu program ditetapkan sebagai prioritas, dan apakah kriteria tersebut tertulis?	Dokumen kriteria prioritas TAPD, RKPD
	P2. Apakah prioritas mencerminkan isu strategis dan kebutuhan masyarakat, atau mengikuti pola alokasi tahun sebelumnya?	RPJMD, hasil musrenbang, APBD berjalan
	P3. Sejauh mana prioritas daerah selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional?	KEM-PPKF 2027, RKP 2027
RUANG FISKAL	F1. Berapa ruang fiskal yang benar-benar tersedia setelah belanja wajib dan belanja mengikat?	Proyeksi pendapatan, struktur belanja
	F2. Apakah asumsi pendapatan (PAD dan transfer) realistis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya?	Realisasi APBD, APBD berjalan
	F3. Apa konsekuensi bagi prioritas lain bila satu prioritas diperkuat (pertukaran pilihan)?	Rancangan KUA, simulasi alokasi
KINERJA	K1. Apa yang “dibeli” oleh setiap rupiah pada program dengan plafon terbesar?	Rancangan PPAS, target kinerja

Lensa	Pertanyaan strategis	Dokumen/data uji
	K2. Apakah indikator dan target kinerja cukup jelas dan terukur untuk menguji keberhasilan program?	Dokumen indikator kinerja
	K3. Apakah kinerja dan kapasitas pelaksanaan tahun sebelumnya mendukung target dan plafon yang diusulkan?	Realisasi dan capaian kinerja tahun lalu
DAMPAK	I1. Siapa penerima manfaat dan seberapa luas cakupannya dibandingkan kebutuhan?	Data sasaran dan cakupan program
	I2. Apakah program berkontribusi nyata terhadap sasaran makro daerah (pertumbuhan, kemiskinan, kualitas SDM)?	Target kinerja makro, RPJMD
	I3. Apakah manfaat tersebar merata antarwilayah dan kelompok sasaran?	Data sebaran sasaran program
POSISI	S1. Isu mana yang harus menjadi agenda utama dalam pembahasan bersama TAPD?	Hasil sintesis seluruh lensa
	S2. Prioritas apa yang perlu diperkuat, dikaji kembali, atau dikendalikan risikonya?	Matriks telaah
	S3. Data dan dokumen tambahan apa yang harus diminta DPRD sebelum KUA-PPAS disepakati?	Daftar kebutuhan data

B. Hasil 2 — Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS

Matriks telaah disusun pada Hari II oleh lima kelompok kerja dan dihimpun pada sesi akhir. Matriks memuat temuan awal untuk setiap lensa beserta tingkat perhatian dan implikasi bagi pembahasan.

Tabel 14. Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal KUA-PPAS

Lensa	Fokus pengujian	Temuan awal reviu (indikatif)	Perhatian	Implikasi bagi pembahasan
Konsistensi	Keterlacakan RPJMD → RKPD → KUA-PPAS; konsistensi program, indikator, target, dan pagu	Sebagian besar program prioritas dapat ditelusuri ke RKPD 2027, namun terdapat sejumlah rumusan indikator dan target pada PPAS yang belum sepenuhnya identik dengan RKPD; perubahan pagu belum seluruhnya disertai penjelasan.	**Sedang**	Meminta TAPD menyajikan tabel keterlacakan dan penjelasan setiap perubahan pagu.
Prioritas	Kriteria urgensi, kebutuhan masyarakat, dan kontribusi terhadap target	Kriteria penetapan prioritas belum disajikan secara eksplisit; sebagian alokasi cenderung mengikuti pola tahun sebelumnya.	**Tinggi**	Meminta dokumen kriteria prioritas dan menguji ulang urgensi program berpagu besar.

Lensa	Fokus pengujian	Temuan awal reviu (indikatif)	Perhatian	Implikasi bagi pembahasan
Ruang Fiskal	Asumsi pendapatan, belanja wajib dan mengikat, pembiayaan, pertukaran pilihan	Ruang fiskal setelah belanja wajib dan mengikat relatif terbatas; asumsi pendapatan perlu dikonfirmasi terhadap realisasi dan proyeksi transfer; penguatan satu prioritas menuntut penyesuaian prioritas lain.	**Tinggi**	Menelaah asumsi pendapatan bersama TAPD dan menyusun simulasi pertukaran pilihan alokasi.
Kinerja	Hubungan pagu–target, kualitas indikator, kapasitas pelaksanaan	Sebagian indikator masih berupa keluaran aktivitas dan belum menggambarkan capaian; hubungan antara besaran pagu dan target belum selalu jelas.	**Tinggi**	Meminta penyempurnaan indikator capaian pada program berpagu besar.
Dampak	Penerima manfaat, cakupan, pemerataan, kontribusi pada sasaran makro	Penerima manfaat dan cakupan program belum diuraikan rinci; kontribusi terhadap sasaran makro daerah perlu diperjelas.	**Sedang**	Meminta data sasaran dan cakupan manfaat pada program prioritas.
Risiko & Tematik	Risiko fiskal dan implementasi; penandaan tematik	Risiko implementasi (kesiapan pelaksana, waktu pelaksanaan, ketergantungan transfer) belum dipetakan; penandaan tematik belum dibaca sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan.	**Sedang**	Meminta peta risiko dan penjelasan penandaan tematik pada program prioritas.

Keterangan: Tingkat perhatian ditetapkan peserta berdasarkan materialitas dan urgensi pembahasan: Tinggi = harus dituntaskan sebelum KUA-PPAS disepakati; Sedang = perlu dikonfirmasi dan dipantau dalam pembahasan.

C. Hasil 3 — Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis

Pada Hari III temuan matriks disintesiskan menjadi enam isu strategis. Setiap isu dirumuskan dengan posisi DPRD dan rekomendasi strategis yang dapat digunakan dalam pembahasan bersama TAPD.

Tabel 15. Isu strategis, posisi DPRD, dan rekomendasi

No.	Isu strategis	Posisi DPRD	Rekomendasi strategis
1	Keterlacakan dan konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran	Konsistensi RPJMD–RKPD–KUA-PPAS menjadi syarat awal pembahasan.	Meminta tabel keterlacakan program dan penjelasan perubahan pagu dari TAPD.
2	Kriteria prioritas dan pagu sebagai “jatah” perangkat daerah	Pagu harus dapat dijelaskan oleh prioritas, target, dan kapasitas pelaksanaan, bukan pola tahun lalu.	Meminta kriteria dan metode penetapan prioritas, serta menguji program berpagu besar.

No.	Isu strategis	Posisi DPRD	Rekomendasi strategis
3	Realisme asumsi pendapatan dan ruang fiskal	Prioritas hanya dapat disepakati bila didukung kapasitas fiskal yang realistis.	Meminta proyeksi pendapatan, rincian belanja mengikat, dan simulasi ruang fiskal.
4	Keterukuran indikator dan hubungan pagu–kinerja	Setiap plafon harus terhubung dengan target kinerja yang terukur.	Meminta indikator capaian pada program berpagu besar dengan rantai kinerja yang jelas.
5	Kejelasan manfaat publik dan kontribusi pada sasaran makro	Anggaran diuji pada manfaat bagi masyarakat, bukan hanya serapan.	Meminta data penerima manfaat, cakupan, dan sebaran program prioritas.
6	Pemetaan risiko implementasi dan keselarasan tematik	Risiko dan penandaan tematik perlu terbaca sebelum prioritas dikunci.	Meminta peta risiko dan penjelasan penandaan tematik program prioritas.

Tabel 16. Pengelompokan prioritas pembahasan

Prioritas yang perlu diperkuat	Prioritas yang perlu dikaji kembali	Risiko yang perlu dikendalikan
• Program yang terhubung langsung dengan pelayanan dasar, kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan pangan • Program dengan target capaian jelas dan kesiapan pelaksana memadai • Program yang selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional 2027	• Program berpagu besar tanpa kontribusi yang terukur terhadap target pembangunan • Kegiatan baru pada PPAS tanpa jejak perencanaan di RKPD • Alokasi yang hanya mengikuti pola tahun sebelumnya	• Ketergantungan pada asumsi pendapatan yang belum teruji • Belanja mengikat yang mengurangi ruang fiskal prioritas • Kesiapan pelaksana dan waktu pelaksanaan program

Dari posisi tersebut, DPRD merumuskan lima rekomendasi strategis berikut.

1. Meminta TAPD menyampaikan tabel keterlacakan RPJMD–RKPD–KUA-PPAS sebagai bahan awal pembahasan.
2. Meminta dokumen kriteria dan metode penetapan prioritas serta dasar penetapan plafon.
3. Meminta proyeksi pendapatan dan simulasi ruang fiskal beserta konsekuensi pertukaran pilihan antarprioritas.
4. Meminta penyempurnaan indikator dan target kinerja (khususnya capaian) pada program berpagu besar.
5. Mengintegrasikan hasil workshop ke dalam pembahasan KUA-PPAS di alat kelengkapan dewan dan mengawal konsistensinya hingga RKA-SKPD dan RAPBD.

D. Hasil 4 — Ringkasan Evaluasi dan Komitmen

Ringkasan pembelajaran**.** Peserta menyimpulkan lima pembelajaran utama: (1) KUA-PPAS perlu dibaca sebagai dokumen kebijakan, bukan hanya daftar angka; (2) pertanyaan "mengapa prioritas" harus mendahului pertanyaan "berapa pagu"; (3) ruang fiskal selalu membawa konsekuensi pertukaran pilihan; (4) kinerja harus dibaca sampai capaian dan dampak; dan (5) posisi DPRD yang kuat bertumpu pada dokumen dan bukti. Hasil evaluasi kuantitatif disajikan pada Bab VI.

Komitmen tindak lanjut yang disepakati peserta ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Komitmen tindak lanjut peserta

No.	Komitmen	Pelaksana	Waktu
1	Menggunakan SKPRF enam lensa sebagai kerangka baku telaahan KUA-PPAS	Pimpinan dan anggota DPRD	Selama pembahasan KUA-PPAS 2027
2	Menyampaikan hasil workshop (Peta Pertanyaan, Matriks, Posisi) dalam rapat internal pimpinan dan alat kelengkapan dewan	Pimpinan DPRD	Dua minggu setelah kegiatan
3	Mengajukan permintaan data dan dokumen tambahan kepada TAPD (keterlacakan, kriteria prioritas, proyeksi pendapatan)	Pimpinan dan Badan Anggaran, dengan dukungan Sekretariat DPRD	Sebelum rapat pembahasan KUA-PPAS
4	Menggunakan Matriks Telaah sebagai lembar kerja baku dalam pembahasan	Komisi dan Badan Anggaran	Selama pembahasan
5	Menguji hubungan pagu–target pada program berpagu besar mitra kerja komisi	Komisi	Rapat kerja dengan mitra
6	Mendorong penyempurnaan indikator capaian pada program prioritas	Komisi	Sebelum penyusunan RKA-SKPD
7	Mengawal konsistensi KUA-PPAS hingga RKA-SKPD dan RAPBD	Badan Anggaran	Tahap penyusunan RAPBD
8	Mendiseminasikan hasil workshop kepada anggota yang belum mengikuti kegiatan	Pimpinan dan Sekretariat DPRD	Dua minggu setelah kegiatan

E. Dokumentasi dan Perekaman Pengetahuan

Seluruh proses dan hasil kegiatan didokumentasikan sebagai satu Dokumen Pengetahuan Strategis KUA-PPAS yang mengikuti alur konsistensi → prioritas → ruang fiskal → kinerja → dampak → posisi. Dokumentasi tidak diposisikan sebagai arsip administratif, tetapi sebagai basis pengetahuan yang dapat digunakan kembali dalam pembahasan KUA-PPAS, penyusunan dan pembahasan RAPBD, serta tindak lanjut penganggaran pada tahap berikutnya.

Tabel 18. Komponen dokumen pengetahuan dan lokasinya dalam laporan

Komponen dokumentasi	Lokasi dalam laporan
Pertanyaan strategis yang diajukan	Bab IV.A (Peta Pertanyaan)
Dokumen dan bukti, hasil analisis, serta pertimbangan fiskal	Bab II.D, Bab III.B, dan Bab IV.B (Matriks Telaah)
Posisi peserta dan rekomendasi strategis	Bab IV.C
Komitmen tindak lanjut	Bab IV.D
Materi narasumber, daftar hadir, foto, dan notulensi	Lampiran A, B, C, dan F

BAB V

DINAMIKA DISKUSI, KENDALA, DAN SARAN

A. Dinamika Diskusi

Diskusi selama tiga hari berlangsung aktif dan terarah. Pada Hari I, pertanyaan peserta banyak berkisar pada hubungan antardokumen perencanaan dan penganggaran serta perbedaan antara membaca angka dan menguji pilihan kebijakan. Pada Hari II, dinamika meningkat ketika kelompok mulai membaca dokumen secara langsung: peserta saling menantang dasar argumentasi, meminta bukti halaman dan angka rujukan, dan beberapa kelompok merevisi temuan setelah mendapat umpan balik narasumber. Pada Hari III, diskusi bergeser dari temuan ke pilihan sikap, dengan perdebatan hasiltif mengenai urutan prioritas pembahasan dan batas peran DPRD terhadap TAPD.

Tabel 19. Isu utama yang mengemuka dalam diskusi dan tanggapan

No.	Isu yang mengemuka	Tanggapan narasumber/fasilitator
1	Perbedaan antara kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral dalam menilai usulan program	Prioritas ditetapkan melalui kriteria tertulis (urgensi, manfaat publik, kontribusi pada target) dan diuji dengan bukti; kepentingan sektoral dikenali ketika alokasi tidak dapat dijelaskan oleh kriteria tersebut.
2	Pagu dipandang sebagai “jatah” perangkat daerah dan sulit digeser	Pagu diuji melalui hubungan dengan target kinerja, prioritas pembangunan, dan kapasitas pelaksanaan; pertanyaan DPRD diarahkan pada alasan alokasi, bukan hanya besarannya.
3	Batas peran DPRD terhadap kewenangan TAPD dan perangkat daerah	DPRD tidak menggantikan kewenangan TAPD, tetapi memperkuat fungsi anggaran melalui pertanyaan tajam, analisis berbasis dokumen, dan posisi kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4	Ruang fiskal terbatas sehingga penambahan satu program berarti pengurangan program lain	Peserta diajak membaca pertukaran pilihan secara eksplisit: prioritas yang diperkuat selalu berimplikasi pada ruang pembiayaan prioritas lain, sehingga pilihan harus disertai alasan.
5	Indikator banyak berupa keluaran kegiatan sehingga sulit menilai keberhasilan	Digunakan rantai kinerja Masukan → Keluaran → Capaian → Dampak untuk menilai apakah indikator menggambarkan perubahan yang dihasilkan, bukan hanya aktivitas.
6	Posisi aspirasi masyarakat dan pokok pikiran dalam kerangka prioritas	Aspirasi dinilai dengan kriteria yang sama dan ditelusuri keterkaitannya dengan RKPD, sehingga aspirasi memperoleh dasar kebijakan yang kuat dalam pembahasan.

B. Kendala Teknis dan Non-Teknis

Secara umum kegiatan berjalan lancar. Beberapa kendala berikut dijumpai dan dapat diatasi pada saat pelaksanaan.

Tabel 20. Kendala pelaksanaan dan penanganannya

No.	Kendala	Dampak	Penanganan
1	Registrasi dan kedatangan peserta Hari I memerlukan waktu lebih panjang dari rencana	Pembukaan dan komitmen belajar bergeser 10–15 menit	Durasi efektif setiap sesi dipertahankan; waktu istirahat disesuaikan
2	Dokumen Rancangan KUA-PPAS tersedia dalam jumlah cetak terbatas, dan sebagian data pendukung (realisasi, kapasitas fiskal) belum lengkap	Penelusuran dokumen oleh sebagian kelompok hanya dapat dilakukan sebagian	Dokumen dibagi per kelompok; data yang belum tersedia dicatat sebagai kebutuhan data untuk diminta kepada TAPD
3	Jaringan internet di ruang pertemuan sesekali tidak stabil saat pencarian rujukan regulasi secara daring	Pencarian rujukan tertunda beberapa menit	Rujukan regulasi dan materi dibagikan dalam bentuk cetak dan berkas digital luring
4	Sesi I memuat tiga lensa sekaligus (konsistensi, prioritas, ruang fiskal) dalam satu sesi	Waktu diskusi kelompok terasa padat	Pembagian satu lensa per kelompok dan penguatan fasilitasi lembar kerja
5	Perbedaan pengalaman peserta dalam memahami istilah teknis penganggaran	Sebagian peserta memerlukan penjelasan tambahan	Penjelasan istilah dengan contoh kasus dan pendampingan langsung pada kelompok

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan pelaksanaan, diskusi, dan umpan balik peserta, saran perbaikan untuk kegiatan serupa pada masa mendatang adalah:

1. Menyampaikan dokumen kerja (Rancangan KUA-PPAS, RKPD, dan data pendukung) kepada panitia paling lambat tujuh hari sebelum kegiatan, agar dapat dicetak per kelompok dan dipelajari sebelumnya.
2. Menambah alokasi waktu Sesi I atau memecahnya menjadi dua sesi, sehingga lensa konsistensi, prioritas, dan ruang fiskal memperoleh waktu diskusi yang lebih longgar.
3. Menyiapkan templat matriks telaah dan tabel keterlacakan dalam format cetak maupun digital sejak Hari I.
4. Menyediakan sesi klinik per komisi atau Badan Anggaran untuk menerapkan kerangka SKPRF pada dokumen riil.
5. Menjadwalkan pendampingan lanjutan pada saat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD agar hasil workshop terjaga keberlanjutannya.
6. Menyiapkan glosarium istilah teknis penganggaran ringkas bagi peserta.

BAB VI

EVALUASI DAN CAPAIAN KEGIATAN

A. Pendekatan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara sederhana namun profesional, tidak dirancang sebagai instrumen akademik yang membebani peserta. Evaluasi mencakup (1) refleksi pra dan pasca kegiatan atas enam indikator kemampuan yang sesuai dengan capaian kegiatan, dan (2) penilaian tujuh dimensi evaluasi, yaitu Relevansi, Pemahaman Regulasi, Manfaat Analitis, Kontribusi Narasumber, Efektivitas Fasilitator, Efektivitas Metode, dan Kesiapan Menerapkan. Kedua instrumen diisi oleh 29 peserta (100% responden) menggunakan skala 1–5, dan butir instrumen terlampir pada Lampiran D, sedangkan rekapitulasi hasil per responden terlampir pada *Lampiran E.*

Tabel 21. Kategori skor rata-rata

Rentang skor	1,00–1,80	1,81–2,60	2,61–3,40	3,41–4,20	4,21–5,00
Kategori	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik

B. Hasil Penilaian Tujuh Dimensi

Skor rata-rata keseluruhan adalah 4,57 (Sangat Baik). Seluruh dimensi berada pada kategori Sangat Baik, dengan skor tertinggi pada Efektivitas Fasilitator (4,72) dan Kontribusi Narasumber (4,69), serta skor terendah pada Kesiapan Menerapkan (4,41) yang tetap berada pada kategori Sangat Baik. Tidak ada responden yang memberikan penilaian di bawah 3 (cukup).

Tabel 22. Hasil penilaian tujuh dimensi evaluasi (n = 29; skala 1–5)

Dimensi	Sangat setuju (5)	Setuju (4)	Cukup (3)	Rata-rata	Kategori
Relevansi	19 (65,5%)	9 (31,0%)	1 (3,4%)	4,62	Sangat Baik
Pemahaman Regulasi	14 (48,3%)	14 (48,3%)	1 (3,4%)	4,45	Sangat Baik
Manfaat Analitis	17 (58,6%)	11 (37,9%)	1 (3,4%)	4,55	Sangat Baik
Kontribusi Narasumber	20 (69,0%)	9 (31,0%)	0 (0,0%)	4,69	Sangat Baik
Efektivitas Fasilitator	21 (72,4%)	8 (27,6%)	0 (0,0%)	4,72	Sangat Baik
Efektivitas Metode	16 (55,2%)	12 (41,4%)	1 (3,4%)	4,52	Sangat Baik
Kesiapan Menerapkan	13 (44,8%)	15 (51,7%)	1 (3,4%)	4,41	Sangat Baik
Keseluruhan	**120 (59,1%)**	**78 (38,4%)**	**5 (2,5%)**	**4,57**	**Sangat Baik**

Tingginya skor Efektivitas Fasilitator dan Kontribusi Narasumber sejalan dengan desain kegiatan yang menempatkan fasilitator sebagai pengendali proses dan narasumber sebagai

pemimpin substansi. Skor Kesiapan Menerapkan yang relatif lebih rendah menunjukkan bahwa kesiapan penerapan memerlukan dukungan lanjutan (misalnya pendampingan dan dokumen riil) agar kerangka SKPRF benar-benar digunakan pada pembahasan.

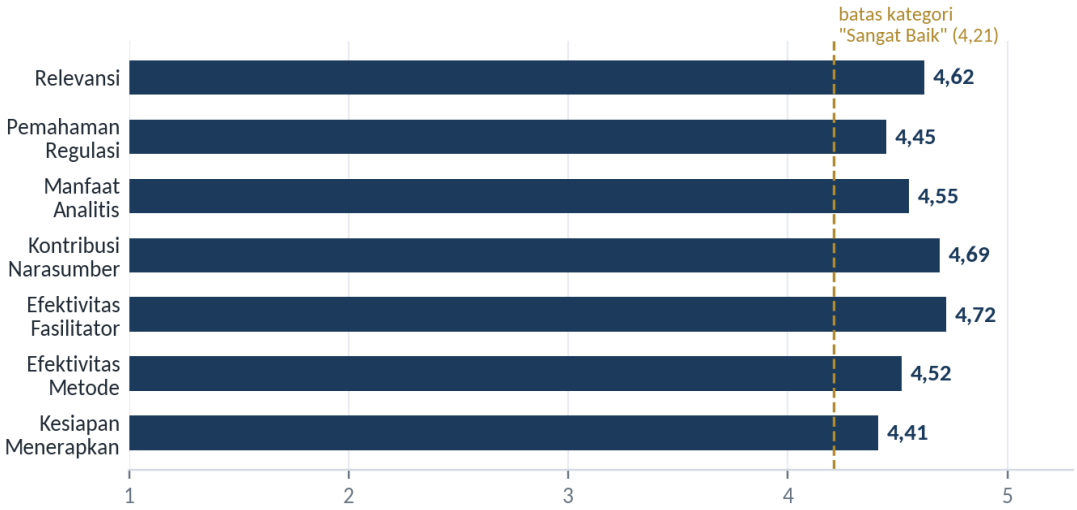

Gambar 1. *Skor rata-rata tujuh dimensi evaluasi (skala 1–5)*

C. Hasil Refleksi Pra dan Pasca Kegiatan

Refleksi diisi peserta pada awal Hari I (pra) dan pada sesi akhir Hari III (pasca) melalui penilaian mandiri atas enam kemampuan yang menjadi capaian kegiatan. Rata-rata skor meningkat dari 2,63 (Cukup) menjadi 4,13 (Baik), atau naik 1,50 poin (57,0%).

Tabel 23. Hasil refleksi pra dan pasca kegiatan (n = 29; skala 1–5)

No.	Kemampuan (indikator capaian)	Pra	Pasca	Selisih	Kenaikan
1	Membaca KUA-PPAS secara lintas dokumen	2,76	4,14	+1,38	50,0%
2	Menguji hubungan prioritas dengan anggaran	2,59	4,24	+1,65	63,7%
3	Menguji hubungan anggaran dengan kinerja	2,52	4,07	+1,55	61,5%
4	Mengidentifikasi pertukaran pilihan fiskal	2,41	3,97	+1,56	64,7%
5	Membedakan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral	2,83	4,28	+1,45	51,2%
6	Membangun argumentasi dan rekomendasi berbasis dokumen	2,69	4,10	+1,41	52,4%
	Rata-rata	**2,63**	**4,13**	**+1,50**	**57,0%**

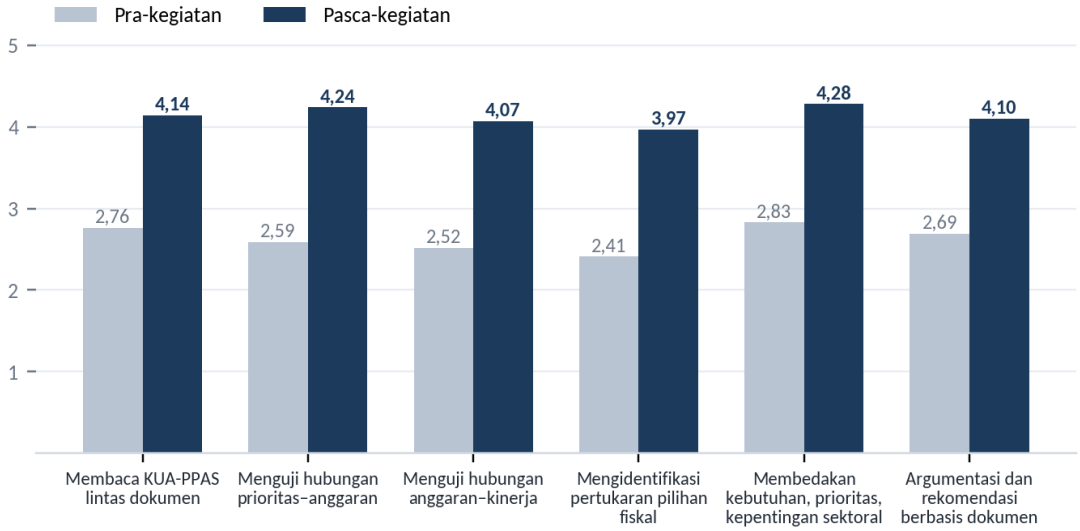

Gambar 2. *Perbandingan skor refleksi pra dan pasca kegiatan*

Kenaikan terbesar terjadi pada kemampuan mengidentifikasi pertukaran pilihan fiskal (+1,56) dan menguji hubungan prioritas dengan anggaran (+1,65). Dua kemampuan ini berkaitan langsung dengan lensa Ruang Fiskal dan Prioritas yang dilatihkan secara intensif pada Hari II. Skor pasca terendah (3,97) pada kemampuan pertukaran pilihan fiskal menunjukkan bahwa topik ini masih memerlukan latihan lanjutan dengan data riil.

D. Umpan Balik Kualitatif

Umpan balik terbuka dari peserta dikelompokkan menjadi hal yang paling bermanfaat dan hal yang perlu ditingkatkan (satu peserta dapat menyebut lebih dari satu hal).

Tabel 24. Rekapitulasi umpan balik terbuka peserta (n = 29)

Kategori	Tema	Peserta (orang)
Paling bermanfaat	Kerangka enam lensa SKPRF memberi cara membaca KUA-PPAS yang sistematis	22
	Latihan membaca dokumen langsung dan pengisian matriks telaah	19
	Pembahasan pertukaran pilihan fiskal dan rantai kinerja	16
Perlu ditingkatkan	Waktu diskusi kelompok pada Hari II masih terasa padat	14
	Dokumen kerja sebaiknya lebih lengkap dan dibagikan sebelum kegiatan	12
	Perlu pendampingan lanjutan saat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD	10

E. Capaian terhadap Kerangka Hasil dan Tujuan Khusus

Tabel 25. Capaian indikator pada kerangka hasil kegiatan

Level	Indikator	Realisasi	Bukti verifikasi	Status
Hasil 1	Pertanyaan strategis tersusun sistematis berdasarkan isu pembangunan, fiskal, kinerja, dan kepentingan DPRD	18 pertanyaan pada enam lensa	Peta Pertanyaan Strategis (Bab IV.A)	**Tercapai**
Hasil 2	Dimensi analisis SKPRF diuji dan terdokumentasi dalam matriks telaah	Lima lensa telaah dan pemetaan risiko/tematik terdokumentasi	Matriks Telaah KUA-PPAS (Bab IV.B)	**Tercapai**
Hasil 3	Isu strategis, prioritas pembahasan, posisi, dan rekomendasi DPRD dirumuskan	6 isu strategis dan 5 rekomendasi	Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis (Bab IV.C)	**Tercapai**
Hasil 4	Ringkasan pembelajaran, evaluasi, dan komitmen tindak lanjut tersusun	5 pembelajaran utama dan 8 komitmen	Ringkasan Evaluasi dan Komitmen (Bab IV.D, Bab VI)	**Tercapai**
Capaian	Peserta mampu menghubungkan perencanaan, kapasitas fiskal, kinerja, dan dampak dalam menelaah KUA-PPAS	Skor refleksi 2,63 → 4,13; Kesiapan Menerapkan 4,41	Refleksi dan evaluasi pembelajaran (Bab VI.B–C)	**Tercapai**

Tabel 26. Pemenuhan tujuan khusus kegiatan

No.	Tujuan khusus	Sesi / hasil pemenuhan	Status
1	Memahami kedudukan KUA-PPAS dalam siklus perencanaan dan penganggaran	Sesi Strategis (Hari I)	Tercapai
2	Menguji konsistensi RPJMD–RKPD–KUA-PPAS	Sesi I; Matriks Telaah	Tercapai
3	Menilai keselarasan dengan arah kebijakan fiskal nasional	Sesi Strategis; Sesi I (prioritas)	Tercapai
4	Mengidentifikasi prioritas yang urgen dan strategis	Sesi I (telaah prioritas)	Tercapai
5	Menganalisis kapasitas dan ruang fiskal	Sesi I (telaah ruang fiskal)	Tercapai
6	Menguji hubungan plafon dan target kinerja	Sesi II (telaah kinerja)	Tercapai
7	Menilai kualitas indikator, sasaran, keluaran, dan capaian	Sesi II (telaah kinerja)	Tercapai
8	Mengidentifikasi risiko fiskal dan implementasi	Sesi II (risiko)	Tercapai
9	Membaca penandaan tematik sebagai instrumen sinkronisasi	Sesi II (keselarasan tematik)	Tercapai
10	Menilai manfaat dan dampak prioritas anggaran	Sesi II (telaah dampak)	Tercapai
11	Merumuskan isu strategis pembahasan KUA-PPAS	Sesi Sintesis (Hari III)	Tercapai
12	Membangun posisi dan rekomendasi DPRD secara terstruktur	Sesi Perumusan Rekomendasi (Hari III)	Tercapai

F. Pengelolaan Risiko

Tabel 27. Realisasi mitigasi risiko

Risiko yang diantisipasi	Realisasi mitigasi	Status
Pembahasan berhenti pada angka	Peta Pertanyaan berbasis kebijakan, prioritas, kinerja, dan dampak digunakan sebagai pemandu	Terkendali
Dominasi kepentingan sektoral	Kriteria prioritas, urgensi, dan manfaat publik dijadikan dasar pengujian	Terkendali
Pagu dianggap sebagai “jatah” OPD	Pagu diuji terhadap target, prioritas, dan kapasitas pelaksanaan; menjadi isu strategis nomor 2	Terkendali
Diskusi terlalu normatif	Dokumen aktual dan data digunakan dalam Sesi I dan Sesi II	Terkendali
Materi terlalu teknis	Aspek teknis diterjemahkan menjadi implikasi kebijakan; istilah dijelaskan dengan contoh	Terkendali
Data atau dokumen tidak tersedia	Koordinasi dokumen dilakukan; sebagian data pendukung belum lengkap dan dicatat sebagai kebutuhan data kepada TAPD	Terkendali sebagian
Tidak ada hubungan jelas program dan hasil	Rantai kinerja Masukan → Keluaran → Capaian → Dampak digunakan pada Sesi II	Terkendali

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026 dengan tema KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah terlaksana pada 16–18 Oktober 2026 di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan sebagaimana direncanakan. Kesimpulan pelaksanaan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan diikuti 29 pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal dengan kehadiran 100% pada seluruh sesi, dan terselenggara dengan total beban belajar 14,08 JP sesuai ketentuan 14 JP.
2. Jadwal acara berjalan sesuai rencana dengan pergeseran waktu mulai sesi paling lama 15 menit yang masih dalam batas toleransi.
3. Empat hasil kegiatan (Peta Pertanyaan Strategis, Matriks Telaah Konsistensi dan Fiskal, Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis, serta Ringkasan Evaluasi dan Komitmen) berhasil disusun.
4. Evaluasi menunjukkan skor rata-rata 4,57 (Sangat Baik) pada tujuh dimensi, dan refleksi pra–pasca menunjukkan peningkatan kemampuan dari 2,63 (Cukup) menjadi 4,13 (Baik).
5. Kerangka SKPRF dengan alur Pemetaan → Pengujian → Sintesis terbukti membantu peserta bergeser dari pembacaan anggaran menuju penelaahan anggaran dan menyusun posisi strategis yang berbasis dokumen.

B. Rekomendasi

1. DPRD Kota Tegal disarankan menggunakan SKPRF, Peta Pertanyaan, dan Matriks Telaah sebagai instrumen kerja dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama TAPD.
2. DPRD disarankan mengajukan permintaan data tambahan sebagaimana dirumuskan dalam rekomendasi strategis sebelum KUA-PPAS disepakati.
3. Penyelenggara disarankan menyediakan pendampingan lanjutan pada tahap pembahasan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD agar hasil workshop terjaga keberlanjutannya.
4. Untuk kegiatan serupa, dokumen kerja perlu disiapkan lebih awal, dan alokasi waktu Sesi I perlu diperluas sebagaimana saran perbaikan pada Bab V.

C. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan kegiatan

sejenis. Semoga kualitas pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Kota Tegal semakin kuat, berbasis dokumen, kinerja, kapasitas fiskal, dan manfaat publik.

LAMPIRAN A

DAFTAR HADIR PESERTA

Rekapitulasi kehadiran peserta pada tiga hari kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut. Salinan daftar hadir asli (Hari I, II, dan III) disisipkan setelah halaman ini.

Tabel 28. Rekapitulasi daftar hadir per hari

Hari / tanggal	Peserta terdaftar	Hadir	Tidak hadir	Kehadiran
Hari I — 16 Oktober 2026	29	29	0	100%
Hari II — 17 Oktober 2026	29	29	0	100%
Hari III — 18 Oktober 2026	29	29	0	100%

LPPM Unaki Universitas AKI

WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS · DPRD KOTA TEGAL 2026

Daftar Hadir Peserta

"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027"

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Oktober 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1.
2	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2.
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3.
4	MOH. MUSLIM	Anggota	4.
5	H. EKO SUSANTO	Anggota	5.
6	MOH. SEFRUDIN	Anggota	6.
7	ARDY ARAFIQ	Anggota	7
8	EKO MULYONO	Anggota	8.
9	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota	9.
10	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	10.
11	BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.	Anggota	11.
12	TRIONO, S.H.	Anggota	12
13	MOH. MASRURI	Anggota	13.
14	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	14.
15	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota	15.

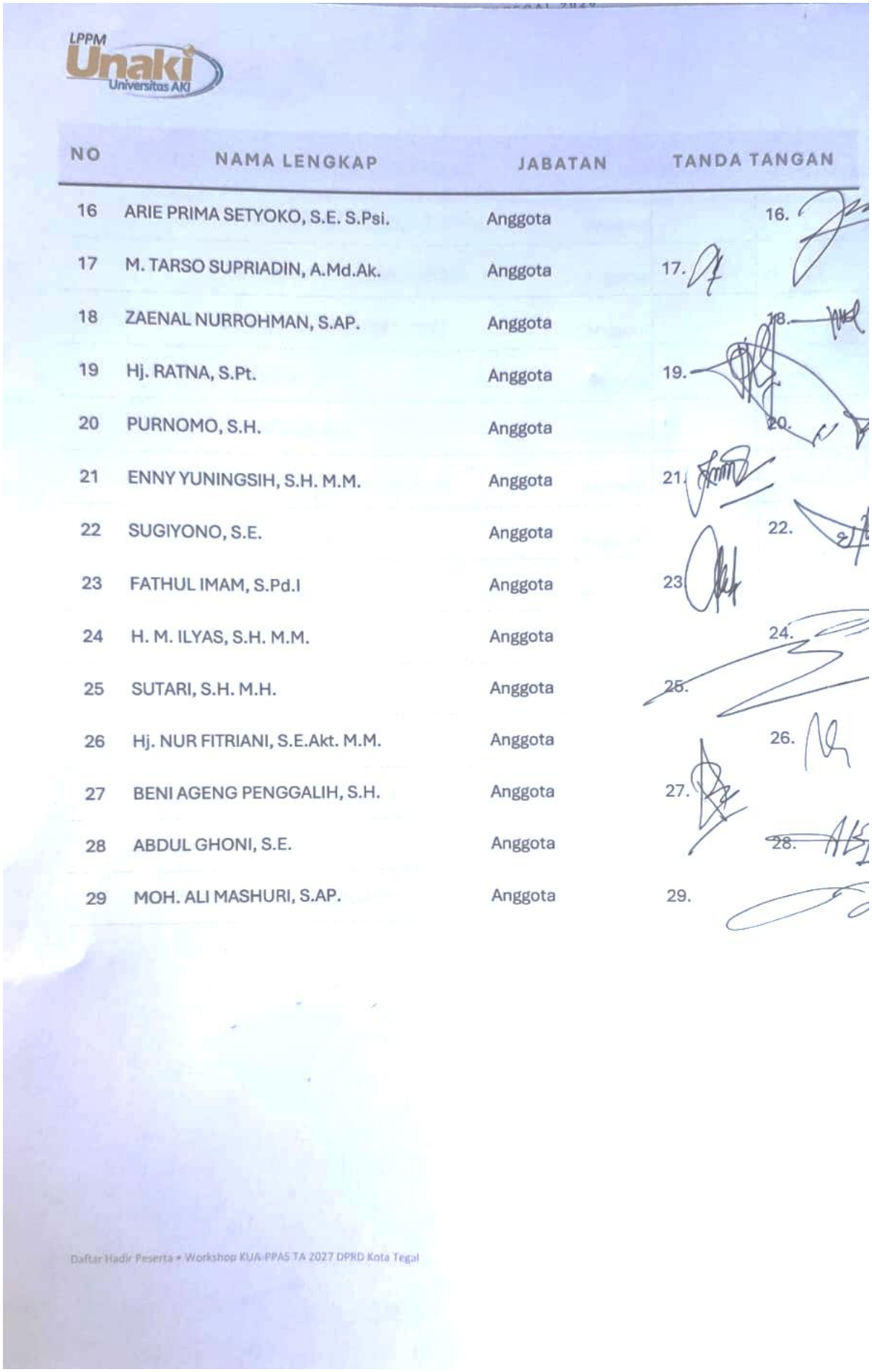

LPPM Unaki Universitas AKI

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
16	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota	16.
17	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota	17.
18	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota	18.
19	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota	19.
20	PURNOMO, S.H.	Anggota	20.
21	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota	21.
22	SUGIYONO, S.E.	Anggota	22.
23	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	23
24	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota	24.
25	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota	25.
26	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota	26.
27	BENI AGENG PENGGALIH, S.H.	Anggota	27.
28	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota	28.
29	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota	29.

Daftar Hadir Peserta • Workshop KUA-PPAS TA 2027 DPRD Kota Tegal

LPPM Unaki Universitas AKI

WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS · DPRD KOTA TEGAL 2026

Daftar Hadir Peserta

"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027"

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Oktober 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1.
2	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2.
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3.
4	MOH. MUSLIM	Anggota	4.
5	H. EKO SUSANTO	Anggota	5.
6	MOH. SEFRUDIN	Anggota	6.
7	ARDY ARAFIQ	Anggota	7.
8	EKO MULYONO	Anggota	8.
9	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota	9.
10	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	10.
11	BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.	Anggota	11.
12	TRIONO, S.H.	Anggota	12.
13	MOH. MASRURI	Anggota	13.
14	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	14.
15	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota	15.

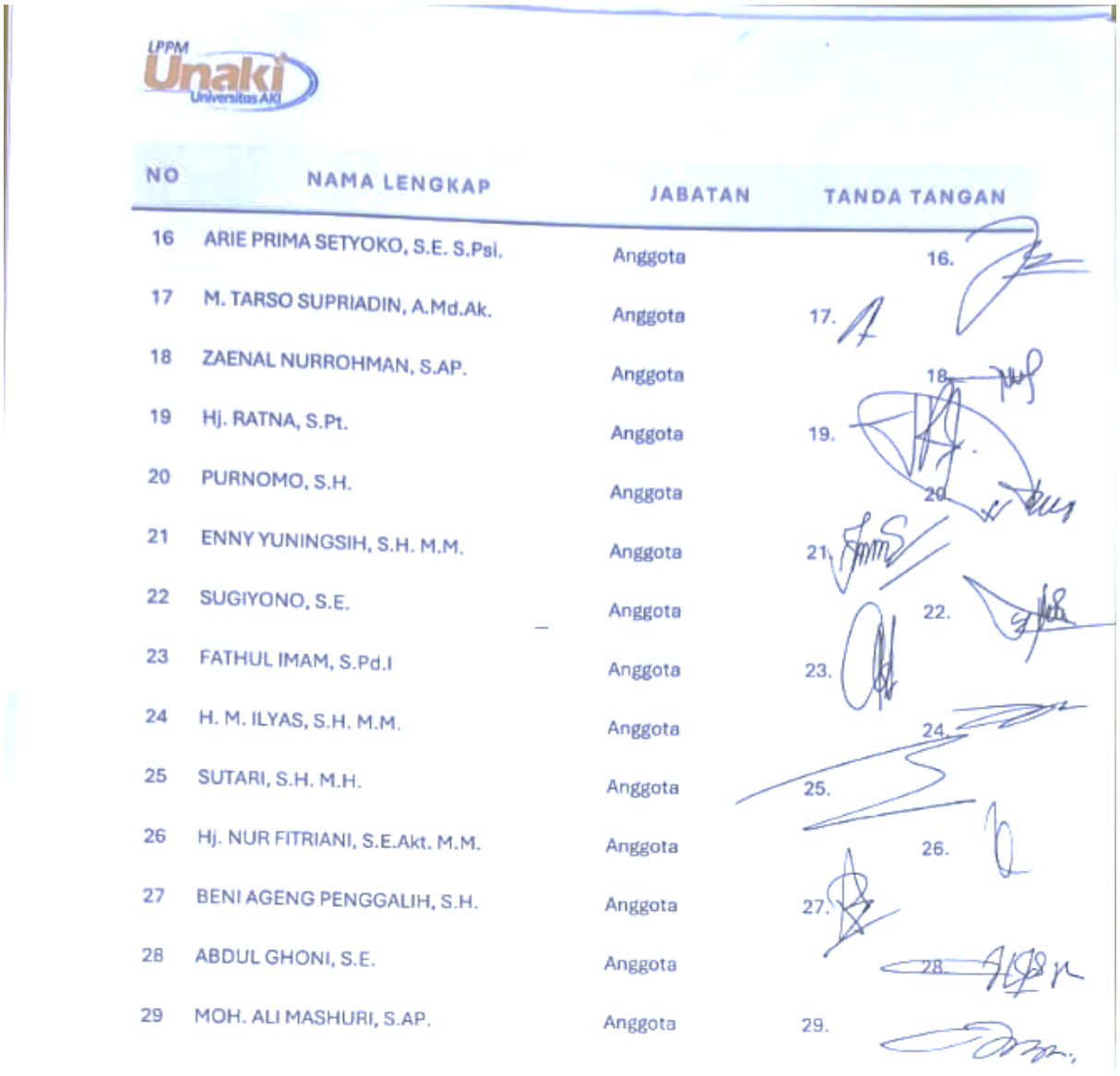

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
16	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota	16.
17	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota	17.
18	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota	18.
19	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota	19.
20	PURNOMO, S.H.	Anggota	20.
21	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota	21.
22	SUGIYONO, S.E.	Anggota	22.
23	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	23.
24	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota	24.
25	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota	25.
26	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota	26.
27	BENI AGENG PENGGALIH, S.H.	Anggota	27.
28	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota	28.
29	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota	29.

LPPM Unaki Universitas AKI

WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS · DPRD KOTA TEGAL 2026

Daftar Hadir Peserta

"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027"

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Oktober 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	1.
2	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2.
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	3.
4	MOH. MUSLIM	Anggota	4.
5	H. EKO SUSANTO	Anggota	5.
6	MOH. SEFRUDIN	Anggota	6.
7	ARDY ARAFIQ	Anggota	7.
8	EKO MULYONO	Anggota	8.
9	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota	9.
10	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota	10.
11	BAGAS SATYA INDRANA, S.H. M.H.	Anggota	11.
12	TRIONO, S.H.	Anggota	12.
13	MOH. MASRURI	Anggota	13.
14	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	14.
15	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota	15.

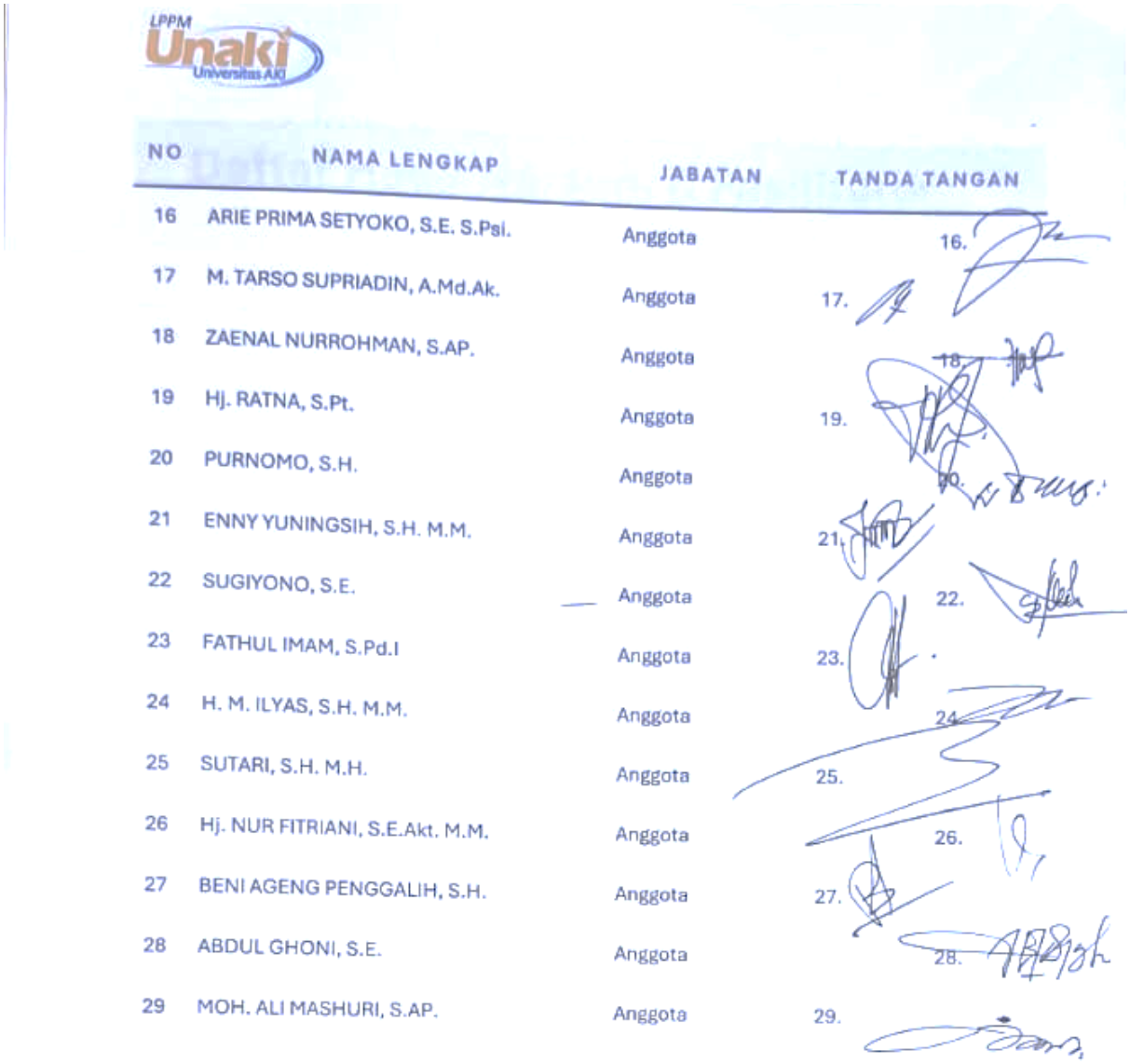

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
16	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota	16.
17	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota	17.
18	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota	18.
19	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota	19.
20	PURNOMO, S.H.	Anggota	20.
21	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota	21.
22	SUGIYONO, S.E.	Anggota	22.
23	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	23.
24	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota	24.
25	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota	25.
26	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota	26.
27	BENI AGENG PENGGALIH, S.H.	Anggota	27.
28	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota	28.
29	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota	29.

LAMPIRAN B

DAFTAR HADIR & MATERI NARASUMBER

Materi presentasi narasumber yang digunakan pada sesi-sesi kegiatan disisipkan setelah halaman ini dengan susunan berikut.

Tabel 29. Daftar materi narasumber

No.	Judul materi	Narasumber	Sesi
1	Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah	Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.	Sesi Strategis (Hari I)
2	Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal	Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si.	Sesi I (Hari II)
3	Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik	Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si.	Sesi II (Hari II)

LPPM Unaki Universitas AKI

WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS · DPRD KOTA TEGAL 2026

Daftar Hadir Narsum & Fasilitator

"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027"

Hari/Tanggal : Jum'at-Minggu, 16-18 Oktober 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M	***Strategic Session:*** Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah	1.
2	Madekhan Ali	***Sesi I*** *Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal*	2.
3	Madekhan Ali	***Sesi II*** *Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik*	3.
4	Teguh Rahmat P	Building Learning Commitment (BLC)	4.
5	Dhea Awinna	Fasilitator	5.

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI KEGIATAN

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027

Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027"
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026
Kerja Sama Sekretariat DPRD Kota Tegal Dengan LPPM Unaki Semarang

DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027

Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LPPM
Unaki
Universitas AKI
WORKSHOP

DOKUMENTASI WORKSHOP
DPRD KOTA TEGAL 2026
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026

LAMPIRAN D

INSTRUMEN EVALUASI

Instrumen disusun ringkas agar tidak membebani peserta dan terdiri atas tiga bagian: (A) refleksi pra dan pasca kegiatan, (B) penilaian tujuh dimensi evaluasi, dan (C) pertanyaan terbuka. Pengisian dilakukan secara anonim.

Petunjuk Pengisian

- Refleksi pra (R1–R6) diisi pada awal Hari I sebelum sesi Pembangunan Komitmen Belajar; refleksi pasca (R1–R6) diisi pada sesi Refleksi, Evaluasi, dan Komitmen di Hari III.
- Penilaian dimensi (E1–E7) dan pertanyaan terbuka (O1–O3) diisi pada Hari III setelah seluruh sesi selesai.
- Lingkari atau centang satu angka pada setiap butir sesuai kondisi yang sebenarnya; tidak ada jawaban benar atau salah.
- Lembar isian tidak memuat nama; peserta hanya diberi kode responden oleh panitia.

Tabel 30. Definisi skala penilaian

Skor	Penilaian dimensi (E1–E7)	Refleksi kemampuan (R1–R6)
1	Sangat tidak setuju	Belum mampu sama sekali
2	Tidak setuju	Kurang mampu
3	Cukup setuju	Cukup mampu
4	Setuju	Mampu
5	Sangat setuju	Sangat mampu

Tabel 31. Butir penilaian tujuh dimensi evaluasi

Kode	Dimensi	Pernyataan
E1	Relevansi	Kegiatan sesuai dengan kebutuhan saya dalam membahas KUA-PPAS TA 2027.
E2	Pemahaman Regulasi	Saya lebih memahami kerangka kebijakan dan regulasi APBD 2027, termasuk hubungan RPJMD–RKPD–KUA-PPAS.
E3	Manfaat Analitis	Kerangka SKPRF membantu saya membaca dan menguji KUA-PPAS secara sistematis.
E4	Kontribusi Narasumber	Narasumber memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas analisis.
E5	Efektivitas Fasilitator	Fasilitator menjaga proses penelusuran dan sintesis secara efektif.
E6	Efektivitas Metode	Alur Pemetaan → Pengujian → Sintesis efektif membantu proses belajar saya.
E7	Kesiapan Menerapkan	Saya siap menerapkan kerangka analisis ini dalam pembahasan KUA-PPAS.

Tabel 32. Butir refleksi pra dan pasca kegiatan

Kode	Pernyataan: "Saat ini saya mampu …"
R1	membaca KUA-PPAS secara lintas dokumen;
R2	menguji hubungan prioritas dengan anggaran;
R3	menguji hubungan anggaran dengan kinerja;
R4	mengidentifikasi pertukaran pilihan fiskal;
R5	membedakan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral;
R6	membangun argumentasi dan rekomendasi berbasis dokumen.

Tabel 33. Pertanyaan terbuka

Kode	Pertanyaan
O1	Hal apa yang paling bermanfaat bagi Anda dari kegiatan ini?
O2	Hal apa yang perlu ditingkatkan pada kegiatan ini?
O3	Saran apa yang Anda berikan untuk kegiatan serupa berikutnya?

Cara Pengolahan Data

- Rata-rata per butir = jumlah skor seluruh responden ÷ jumlah responden (n = 29). Rata-rata keseluruhan = jumlah seluruh skor ÷ (jumlah responden × jumlah butir).
- Distribusi dinyatakan sebagai jumlah dan persentase responden untuk setiap skor.
- Kategori mengikuti interval pada Tabel 21: Sangat Baik (4,21–5,00), Baik (3,41–4,20), Cukup (2,61–3,40), Kurang (1,81–2,60), dan Sangat Kurang (1,00–1,80).
- Selisih pra–pasca = rata-rata pasca − rata-rata pra; kenaikan (%) = selisih ÷ rata-rata pra × 100.
- Umpan balik terbuka dikelompokkan ke dalam tema melalui pengodean sederhana, kemudian dihitung jumlah peserta yang menyebut setiap tema (satu peserta dapat menyebut lebih dari satu tema).
- Refleksi pra–pasca merupakan penilaian mandiri atas persepsi kemampuan, bukan tes pengetahuan, sehingga hasilnya dibaca sebagai indikasi peningkatan kesiapan.

LEMBAR ISIAN EVALUASI

Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026 tentang KUA-PPAS TA 2027. Kode responden: …… Tanggal: ……

Bagian A. Refleksi pra dan pasca kegiatan

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		PRA-KEGIATAN					PASCA-KEGIATAN				
R1	Saya mampu membaca KUA-PPAS secara lintas dokumen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
R2	Saya mampu menguji hubungan prioritas dengan anggaran	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
R3	Saya mampu menguji hubungan anggaran dengan kinerja	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
R4	Saya mampu mengidentifikasi pertukaran pilihan fiskal	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
R5	Saya mampu membedakan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
R6	Saya mampu membangun argumentasi dan rekomendasi berbasis dokumen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Bagian B. Penilaian dimensi evaluasi

Kode	Pernyataan	1	2	3	4	5
E1	Kegiatan sesuai dengan kebutuhan saya dalam membahas KUA-PPAS TA 2027.	o	o	o	o	o
E2	Saya lebih memahami kerangka kebijakan dan regulasi APBD 2027.	o	o	o	o	o
E3	Kerangka SKPRF membantu saya membaca dan menguji KUA-PPAS secara sistematis.	o	o	o	o	o
E4	Narasumber memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas analisis.	o	o	o	o	o
E5	Fasilitator menjaga proses penelusuran dan sintesis secara efektif.	o	o	o	o	o
E6	Alur Pemetaan → Pengujian → Sintesis efektif membantu proses belajar saya.	o	o	o	o	o
E7	Saya siap menerapkan kerangka analisis ini dalam pembahasan KUA-PPAS.	o	o	o	o	o

Bagian C. Pertanyaan terbuka

Kode	Pertanyaan dan jawaban
O1	**Hal yang paling bermanfaat:**
O2	**Hal yang perlu ditingkatkan:**

Kode	Pertanyaan dan jawaban
O3	**Saran untuk kegiatan berikutnya:**

LAMPIRAN E

REKAPITULASI HASIL EVALUASI

Lampiran ini memuat data dasar hasil evaluasi yang diolah pada Bab VI. Responden dicatat secara anonim dengan kode P01–P29 (29 peserta, tingkat pengembalian 100%). Skala penilaian 1–5 sebagaimana Lampiran D; kode E1–E7 merujuk pada butir penilaian dimensi evaluasi dan R1–R6 pada butir refleksi pra dan pasca kegiatan.

Tabel 34. Rekapitulasi penilaian tujuh dimensi evaluasi per responden

Resp.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Rata-rata
P01	4	5	5	5	5	5	4	4,71
P02	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P03	3	4	5	4	4	4	4	4,00
P04	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P05	5	5	4	4	5	4	4	4,43
P06	4	4	5	4	5	5	5	4,57
P07	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P08	5	5	4	5	5	5	5	4,86
P09	5	5	5	5	5	5	4	4,86
P10	5	4	5	5	5	5	5	4,86
P11	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P12	5	5	4	5	5	5	4	4,71
P13	5	5	5	5	5	5	4	4,86
P14	4	4	4	4	4	3	4	3,86
P15	5	4	4	5	5	4	5	4,57
P16	5	5	4	5	5	5	4	4,71
P17	4	4	4	4	4	4	4	4,00
P18	4	4	4	4	4	4	4	4,00
P19	5	4	3	4	4	4	5	4,14
P20	4	4	4	5	5	4	4	4,29
P21	5	4	5	4	5	4	4	4,43
P22	5	4	4	5	5	4	4	4,43
P23	4	5	5	5	4	5	5	4,71
P24	5	4	5	5	4	4	3	4,29
P25	4	3	5	5	5	5	4	4,43
P26	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P27	5	5	5	5	5	5	5	5,00
P28	5	4	4	4	5	4	5	4,43
P29	4	4	5	5	4	4	4	4,29
Rata-rata	**4,62**	**4,45**	**4,55**	**4,69**	**4,72**	**4,52**	**4,41**	**4,57**

Catatan: Distribusi skor sesuai Tabel 22: tidak ada responden yang menilai di bawah 3. Rata-rata keseluruhan 4,57 diperoleh dari 203 penilaian (29 responden × 7 butir).

Tabel 35. Rekapitulasi refleksi pra dan pasca kegiatan per responden

Resp.	R1 pra	R2 pra	R3 pra	R4 pra	R5 pra	R6 pra	R1 pasca	R2 pasca	R3 pasca	R4 pasca	R5 pasca	R6 pasca
P01	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	5	5
P02	3	3	4	3	3	4	5	5	5	4	5	5
P03	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3
P04	3	4	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5
P05	3	2	3	4	2	2	4	4	4	5	4	3
P06	3	2	2	1	2	2	4	4	5	5	5	5
P07	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5
P08	3	2	2	3	2	2	5	4	5	5	5	5
P09	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	5	4
P10	3	4	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5
P11	3	3	3	3	4	3	5	5	4	5	4	5
P12	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	4	5
P13	3	3	3	4	4	3	4	5	4	4	5	4
P14	2	2	2	2	3	2	4	4	3	4	4	3
P15	3	3	2	2	3	2	4	4	4	4	4	3
P16	3	3	2	1	3	3	4	5	4	3	4	4
P17	3	2	2	1	2	2	3	4	4	5	3	3
P18	2	2	1	1	1	2	3	5	4	3	3	3
P19	2	2	2	1	2	2	4	5	4	3	4	5
P20	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4
P21	3	3	3	4	4	3	5	4	4	5	4	4
P22	3	3	3	3	3	2	5	3	4	4	4	3
P23	1	3	3	2	4	2	4	4	4	3	5	5
P24	3	2	1	2	2	2	4	4	4	3	3	3
P25	2	3	3	2	3	2	5	4	4	4	4	4
P26	3	2	2	2	3	3	4	4	3	4	5	4
P27	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5	5
P28	3	1	2	3	2	2	3	4	3	3	4	3
P29	3	2	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4
Rata-rata	**2,76**	**2,59**	**2,52**	**2,41**	**2,83**	**2,69**	**4,14**	**4,24**	**4,07**	**3,97**	**4,28**	**4,10**

Catatan: Rata-rata keseluruhan pra = 2,63 dan pasca = 4,13 (Tabel 23).

Tabel 36. Contoh umpan balik terbuka peserta (parafrase)

No.	Tema	Contoh umpan balik (parafrase)
1	Paling bermanfaat	Enam lensa SKPRF membantu membaca KUA-PPAS secara runtut, tidak lagi hanya membandingkan angka dengan tahun sebelumnya.

No.	Tema	Contoh umpan balik (parafrase)
2	Paling bermanfaat	Latihan langsung dengan dokumen rancangan membuat pertanyaan kritis lebih mudah dirumuskan.
3	Paling bermanfaat	Pembahasan pertukaran pilihan fiskal membantu memahami konsekuensi saat satu prioritas diperkuat.
4	Perlu ditingkatkan	Waktu diskusi kelompok pada Hari II sebaiknya lebih longgar.
5	Perlu ditingkatkan	Dokumen kerja lebih baik dibagikan sebelum kegiatan agar dapat dipelajari lebih dahulu.
6	Perlu ditingkatkan	Diharapkan ada pendampingan lanjutan saat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD.

LAMPIRAN F

BERITA ACARA DAN NOTULENSI PER SESI

Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan

Pada hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2026, bertempat di Howard Johnson by Wyndham Pekalongan, telah dilaksanakan *Workshop* Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal 2026 dengan tema Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas AKI Semarang. Kegiatan diikuti oleh 29 pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal yang hadir pada seluruh sesi selama tiga hari, dengan narasumber Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M. dan Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si., serta fasilitator Teguh Rahmat P. Seluruh sesi terlaksana sesuai rencana dengan total beban belajar 14,08 JP dan menghasilkan empat hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam laporan ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPPM Universitas AKI Semarang

Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.

Notulensi per Sesi

Notulensi berikut merangkum pokok bahasan, diskusi, serta kesimpulan dan tindak lanjut pada setiap sesi. Jumlah peserta hadir pada seluruh sesi adalah 29 orang.

1. Pembukaan (Hari I)

Waktu dan pelaksana	16 Oktober 2026, 15.10–15.45. Pembawa acara: Dhea Awinna; sambutan: Rektor Universitas AKI dan Ketua DPRD Kota Tegal.
Pokok bahasan	• Pembukaan dipandu pembawa acara, Dhea Awinna, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. • Sambutan Rektor Universitas AKI, Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M., tentang komitmen pendampingan akademik bagi DPRD. • Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, S.T., tentang pentingnya kualitas pembahasan KUA-PPAS 2027. • Penyerahan cindramata dari Rektor Universitas AKI kepada Ketua DPRD Kota Tegal dan foto bersama.
Diskusi	• Tidak ada sesi diskusi pada agenda pembukaan.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Kegiatan dibuka dan seluruh peserta diharapkan mengikuti rangkaian sesi secara aktif.

2. Pembangunan Komitmen Belajar (Hari I)

Waktu dan pelaksana	16 Oktober 2026, 15.45–17.15 (90 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Perkenalan, penulisan harapan dan kekhawatiran pada kartu ide, serta pengelompokan tema. • Penyepakatan norma kelas dan komitmen belajar individu dan kolektif.
Diskusi	• Peserta menyampaikan harapan agar workshop memberi cara menguji, bukan sekadar menjelaskan isi dokumen. • Peserta mengkhawatirkan keterbatasan waktu dan ketersediaan data pendukung.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Enam tema harapan dan lima tema kekhawatiran dirumuskan (Tabel 10 dan 11). • Fasilitator menyesuaikan proses dengan menyederhanakan istilah teknis dan menyiapkan lembar kerja terstruktur.

3. Sesi Strategis (Hari I)

Waktu dan pelaksana	16 Oktober 2026, 19.35–21.35 (120 menit). Narasumber: Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.; fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• KUA-PPAS sebagai dokumen kebijakan dan titik kendali sebelum penyusunan RKA-SKPD. • Keterhubungan RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan APBD. • Konteks fiskal nasional 2027 dan pengenalan enam lensa SKPRF.
Diskusi	• Peserta menanyakan perbedaan antara kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral. Narasumber menjelaskan perlunya kriteria prioritas yang tertulis dan bukti pendukung. • Peserta menanyakan batas peran DPRD terhadap TAPD. Narasumber menegaskan DPRD memperkuat fungsi anggaran melalui pertanyaan dan analisis, bukan menggantikan kewenangan TAPD.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Lima kelompok kerja menyusun pertanyaan kritis per lensa menjadi Peta Pertanyaan Strategis (18 pertanyaan).

4. Tinjauan Pertanyaan Kritis (Hari II)

Waktu dan pelaksana	17 Oktober 2026, 08.35–08.50 (15 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Tinjauan pertanyaan kritis hasil Hari I dan pembagian lensa per kelompok. • Penjelasan lembar kerja matriks telaah.
Diskusi	• Peserta meminta kejelasan cara mengisi kolom temuan dan tingkat perhatian pada matriks.

Kesimpulan dan tindak lanjut	• Kelompok 1–5 memegang lensa Konsistensi, Prioritas, Ruang Fiskal, Kinerja, dan Dampak.

5. Sesi I: Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal (Hari II)

Waktu dan pelaksana	17 Oktober 2026, 08.50–12.05 (195 menit). Narasumber: Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si.
Pokok bahasan	• Penelusuran keterhubungan vertikal dan horizontal dokumen perencanaan dan penganggaran (tabel keterlacakan). • Kriteria prioritas: urgensi, kebutuhan masyarakat, isu strategis, dan kontribusi pada target. • Struktur pendapatan dan belanja, belanja wajib, pembiayaan, dan pertukaran pilihan fiskal.
Diskusi	• Peserta menanyakan cara menguji pagu bila data realisasi tidak lengkap. Narasumber menyarankan menguji program berpagu terbesar lebih dahulu dan mencatat data yang kurang sebagai permintaan kepada TAPD. • Peserta menanyakan kedudukan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran. Narasumber menyatakan aspirasi dinilai dengan kriteria yang sama dan ditelusuri keterkaitannya dengan RKPD.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Kelompok mencatat temuan awal konsistensi, prioritas, dan ruang fiskal pada lembar kerja. • Kebutuhan data tambahan dihimpun untuk diminta kepada TAPD.

6. Sesi II: Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik (Hari II)

Waktu dan pelaksana	17 Oktober 2026, 13.35–15.05 dan 15.20–17.05 (195 menit). Narasumber: Dr. H. Madekan, S.Pd., M.Si.
Pokok bahasan	• Rantai kinerja Masukan → Keluaran → Capaian → Dampak dan kualitas indikator. • Penilaian dampak: penerima manfaat, cakupan, pemerataan, dan kontribusi pada sasaran makro. • Risiko fiskal dan implementasi serta penandaan tematik sebagai instrumen sinkronisasi.
Diskusi	• Peserta menyoroti indikator yang masih berupa keluaran kegiatan. Narasumber menunjukkan cara menurunkannya menjadi indikator capaian. • Peserta menanyakan penyikapan atas pagu yang dianggap sebagai jatah perangkat daerah. Narasumber menekankan pengujian hubungan pagu dengan target dan kapasitas pelaksanaan.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Hasil kelompok dihimpun menjadi Matriks Telaah KUA-PPAS. • Tiga lensa dinilai tingkat perhatiannya Tinggi dan tiga lainnya Sedang.

7. Refleksi Strategis (Hari III)

Waktu dan pelaksana	18 Oktober 2026, 08.35–08.50 (15 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Refleksi atas perubahan cara membaca KUA-PPAS, temuan paling mengejutkan, dan pertanyaan yang belum terjawab.
Diskusi	• Peserta menyatakan kini lebih terdorong menanyakan alasan prioritas sebelum membahas besaran pagu.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Pertanyaan yang belum terjawab dibawa ke sesi sintesis.

8. Sesi Sintesis (Hari III)

Waktu dan pelaksana	18 Oktober 2026, 08.50–09.50 (60 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Pengelompokan temuan matriks ke dalam tema besar. • Penyaringan isu dengan kriteria materialitas, urgensi, kewenangan DPRD, dan dampak publik.
Diskusi	• Peserta berdiskusi tentang urutan prioritas isu yang akan diangkat dalam pembahasan bersama TAPD.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Disepakati enam isu strategis pembahasan KUA-PPAS 2027.

9. Sesi Perumusan Rekomendasi (Hari III)

Waktu dan pelaksana	18 Oktober 2026, 10.05–10.40 (35 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Perumusan posisi DPRD: prioritas yang diperkuat, dikaji kembali, risiko yang dikendalikan, dan rekomendasi.
Diskusi	• Peserta memastikan setiap posisi merujuk pada dokumen dan temuan matriks sebagai dasar argumentasi.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Posisi dan Rekomendasi Anggaran Strategis dirumuskan dengan lima rekomendasi strategis.

10. Refleksi, Evaluasi, dan Komitmen (Hari III)

Waktu dan pelaksana	18 Oktober 2026, 10.40–12.40 (120 menit). Fasilitator: Teguh Rahmat P.
Pokok bahasan	• Refleksi pembelajaran, pengisian instrumen evaluasi, dan perumusan komitmen tindak lanjut.
Diskusi	• Peserta menyampaikan perlunya pendampingan lanjutan saat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD.

Kesimpulan dan tindak lanjut	• Delapan komitmen tindak lanjut disepakati (Tabel 17). • Instrumen evaluasi diisi oleh 29 peserta.

11. Penutupan (Hari III)

Waktu dan pelaksana	18 Oktober 2026, 12.40–13.05 (25 menit). LPPM Universitas AKI Semarang.
Pokok bahasan	• Ringkasan capaian empat hasil kegiatan. • Apresiasi atas kehadiran dan partisipasi penuh peserta.
Diskusi	• Tidak ada sesi diskusi pada agenda penutupan.
Kesimpulan dan tindak lanjut	• Kegiatan ditutup secara resmi, dilanjutkan foto bersama.

L A M P I R A N G

CONTOH SERTIFIKAT PESERTA

UNIVERSITAS ABADI KARYA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

S E R T I F I K A T

22/LPPM-UNAKI/X/2026

Diberikan kepada:

Foto

Nama : **ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kota Tegal

Atas partisipasinya dalam Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal tentang **"Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027"** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Abadi Karya Indonesia (UNAKI) Semarang dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2026 di Howard Johnson By Wyndham Pekalongan.

Pekalongan, 18 Oktober 2026
UNAKI SEMARANG
Rektor,

Prof. Dr. Tri Purwani, SE., MM.

LAMPIRAN H

COPY SURAT REKOMENDASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Oktober 2026

Nomor : *073.3/PT11/1184.517/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal

Kepada :
Rektor Universitas AKI
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 500/SM/REK/UNAKI/X/2026, tanggal 07 Oktober 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tegal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2026 sampai dengan 18 Oktober 2026 bertempat di Hotel Howard Johnson By Wyndham Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. Strategic Session: Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah ;
   b. Review Critical Questions ;
   c. Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal;
   d. Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik;
   e. Synthesis Session Menentukan Isu Strategis Pembahasan KUA-PPAS;
   f. Recommendation Session Merumuskan Strategic Budget Position ;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;
4. Sekretaris DPRD Kota Tegal;